

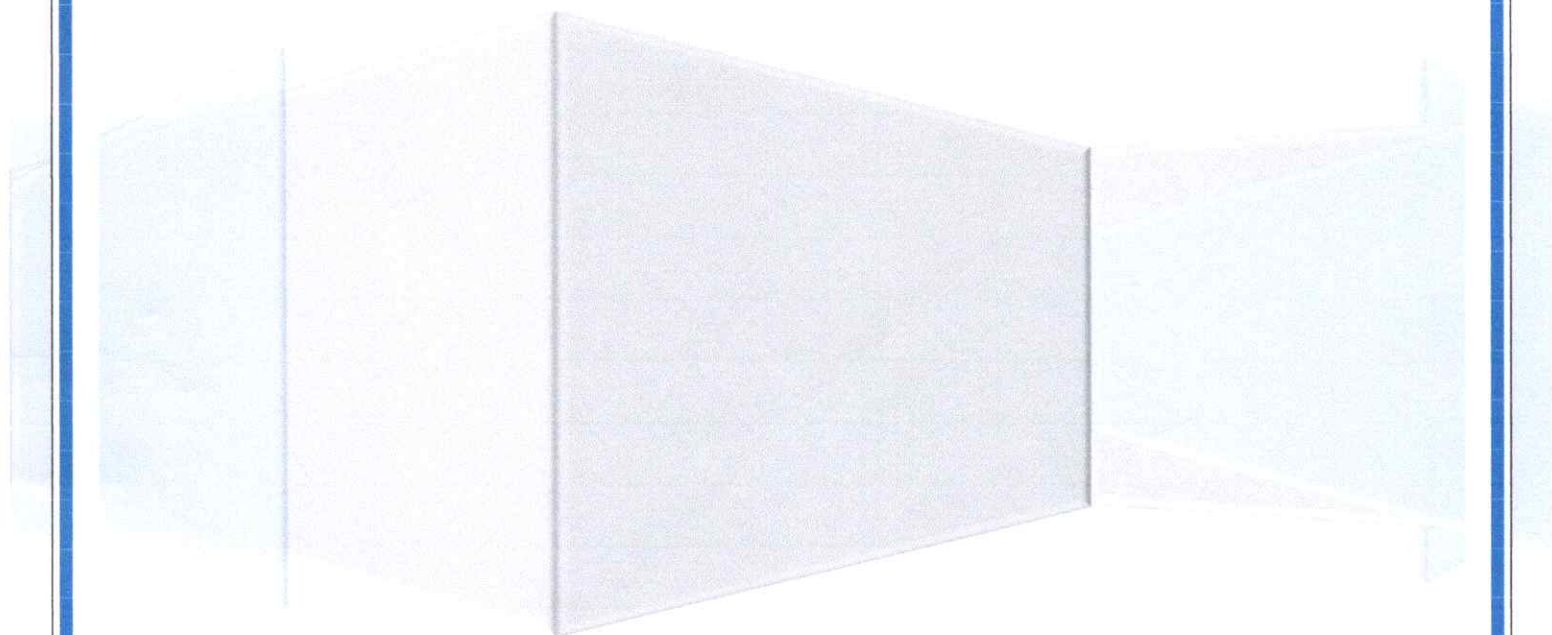
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN KEUANGAN

**(LAPORAN REALISASI KEUANGAN, NERACA, LAPORAN
OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, CALK)**

Per Tanggal 31 Desember 2021





KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang dikelolanya dan Laporan Keuangan Tahunan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS

BUDI UTAMA,S.STP.,M.si

NIP. 198305152001121004



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	xiii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENJELASAN UMUM	
A.1 Dasar Hukum.....	4
A.2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro.....	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	16
BAB II PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B.1. Penjelasan Umum LRA.....	38
B.2 Penjelasan Per Pos LRA.....	89
B.3. Catatan Penting Lainnya.....	97
BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	
C.1. Penjelasan Umum Laporan Neraca.....	103
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca.....	104
C.3. Catatan Penting Lainnya.....	134
BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	
D.1. Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	136
D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional.....	137
D.3. Catatan Penting Lainnya.....	146



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB V	PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
	E.1. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	148
	E.2. Catatan Penting Lainnya.....	150
BAB VI	PENUTUP	152

**DAFTAR TABEL**

		Hal.
Tabel 1	Program dan Kegiatan Beserta Indikator, Target dan Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 s.d. 31 Desember 2021	39
Tabel 2	Target dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	43
Tabel 3	Target dan Realisasi Belanja pegawai pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	44
Tabel 4	Target dan Realisasi Belanja Hibah Pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	45
Tabel 5	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	46
Tabel 6	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	47
Tabel 7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021	48
Tabel 8	Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per 31 Desember 2021	50
Tabel 9	Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021	58



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 10	Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021	57
Tabel 11	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	59
Tabel 12	Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	63
Tabel 13	Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	65
Tabel 14	Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	66
Tabel 15	Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	68
Tabel 16	Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	69
Tabel 17	Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	71
Tabel 18	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	72
Tabel 19	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	74



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 20	Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBLH) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	79
Tabel 21	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitungms.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	82
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	87
Tabel 23	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	89
Tabel 24	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitungs.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	90
Tabel 25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	88
Tabel 26	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitungs.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	93
Tabel 27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	94
Tabel 28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	95
Tabel 29	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	96
Tabel 30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	97



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 31	Rincian Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	100
Tabel 32	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	103
Tabel 33	Posisi Aset Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	105
Tabel 34	Rincian Aset Lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	105
Tabel 35	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021	106
Tabel 36	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021	107
Tabel 37	Rincian Aset Tetap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	109
Tabel 38	Rincian Aset Lainnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	128
Tabel 39	Rincian Aset Tak Berwujud Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	130
Tabel 40	Realisasi Beban Operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	138
Tabel 41	Rincian Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	139
Tabel 42	Rincian Realisasi Beban Persediaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	140



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 43	Rincian Realisasi Beban Hibah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	142
Tabel 44	Rincian Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	143
Tabel 45	Rincian Realisasi Surplus/Defisit dari Operasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	144
Tabel 46	Rincian Realisasi Surplus/Defisit –LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	146
Tabel 47	Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020	148



DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 1	Proporsi APBD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021	73
Grafik 2	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021	74
Grafik 3	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	91



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per Tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS

BUDI UTAMA, S.STP., M.si

NIP. 198305152001121004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.06		Sosial			
Unit Organisasi : 1.06.03		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
2	BELANJA	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	80,26	0,00
2.1	BELANJA OPERASI	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	80,63	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77	0,00
2.1.1.2	Belanja Barang	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	0,00
2.1.1.5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	0,00
2.2	BELANJA MODAL	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	275.684.100,00	153.810.000,00	55,79	0,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(22.758.830.120,95)	(18.266.057.728,00)	80,26	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(22.758.830.120,95)	(18.266.057.728,00)	80,26	0,00

PANGKALPINANG, 31 Desember 2021

Kepala Dinas

BUDI UTAMA, S.STP. M.Si.

NIP. 19830515 200112 1 004



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
Unit Organisasi : 1 . 06 . 03			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
URAIAN			2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan			0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			153.032,00	0,00
Kas di BLUD			0,00	0,00
Kas Dana BOS			0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			0,00	0,00
Kas Lainnya			0,00	0,00
Setara Kas			0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek			0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah			0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah			0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah			0,00	0,00
Piutang Lainnya			0,00	0,00
Penyisihan Piutang			0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka			0,00	0,00
Persediaan			107.414.921,05	0,00
JUMLAH ASET LANCAR			107.567.953,05	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara			0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah			0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi			0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan			0,00	0,00
Dana Bergulir			0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang			0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya			0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya			0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir			0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal			0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah			0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen			0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			0,00	0,00
ASET TETAP				
Tanah			407.800.656,00	0,00
Peralatan dan Mesin			7.135.307.229,00	0,00
Gedung dan Bangunan			14.520.919.616,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi			396.032.673,00	0,00
Aset Tetap Lainnya			263.834.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan			0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan			(9.464.749.768,00)	0,00
JUMLAH ASET TETAP			13.259.144.406,00	0,00
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan			0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN			0,00	0,00
ASET LAINNYA				

Urusan Pemerintahan : 1 . 06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		
Unit Organisasi : 1 . 06 . 03			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
URAIAN			2021	2020	
Tagihan Jangka Panjang			0,00	0,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud			0,00	0,00	
Aset Lain-lain			253.108.416,00	0,00	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH ASET LAINNYA			253.108.416,00	0,00	
JUMLAH ASET			13.619.820.775,05	0,00	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			0,00	0,00	
Utang Bunga			0,00	0,00	
Utang Pinjaman Jangka Pendek			0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka			0,00	0,00	
Utang Belanja			768.072.616,00	0,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			768.072.616,00	0,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang kepada Pemerintah Pusat			0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			0,00	0,00	
Utang kepada Masyarakat			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN			768.072.616,00	0,00	
EKUITAS					
EKUITAS			12.851.748.159,05	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			13.619.820.775,05	0,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020


Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
8.1.1	Beban Pegawai	9.859.999.296,00	0,00	9.859.999.296,00	0,00
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	264.310.311,83	0,00	264.310.311,83	0,00
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.831.304,66	0,00	171.831.304,66	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	28.466.445,18	0,00	28.466.445,18	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.06
 Unit Organisasi : 1.06.03
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Sosial
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(18.646.034.616,62)	0,00	(18.646.034.616,62)	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.646.034.616,62)	0,00	(18.646.034.616,62)	0,00
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(18.646.034.616,62)	0,00	(18.646.034.616,62)	0,00

PANGKALPINANG, 31 Desember 2021
 Kepala Dinas


 BUDI UTAMA, S.STP. M.Si.
 NIP. 19830515 200112 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Sosial		
Unit Organisasi : 1 . 06 . 03 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.646.034.616,62)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	(94.730.927,02)	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	13.326.305.974,69	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.266.207.728,00	0,00
EKUITAS AKHIR	12.851.748.159,05	0,00

PANGKALPINANG, 31 Desember 2021
Kepala Dinas


BUDI UTAMA, S.STP. M.Si.
NIP. 19830515 200112 1 004

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada bulan Juni tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya perubahan penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021, untuk selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penggabungan dan berganti nama menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Kedudukan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

3. Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Provinsi.

- b. Penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang, membawahi:

- a. Subbagian perencanaan
- b. Subbagian umum
- c. Subbagian keuangan

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- c. Seksi Kepahlawanan

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang

Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lanjut Usia
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

5. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana, membawahi:

- a. Seksi Penanganan Bencana
- b. Seksi Pengolahan Data dan Pengelolaan Fakir Miskin
- c. Seksi Pengangkatan Anak

6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa, membawahi:

- a. Seksi Penataan Desa
- b. Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Seksi Keuangan dan Aset Desa

7. Kepala Bidang Kelembagaan, Kerja sama, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan, kerjasama, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
- b. Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Desa
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

a. UPTD Panti Sosial Bina Serumpun

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 B Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Panti Sosial Bina Serumpun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

b. UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 B Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Panti Sosial Bina Laras Hijrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

A.1 DASAR HUKUM

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, selaku Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.



Landasan Hukum Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang- undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



9. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 diperkirakan mulai pulih seiring dengan pendistribusian vaksin Covid-19 yang terdistribusikan dengan baik pada triwulan III tahun 2021 sehingga mendorong normalisasi aktivitas ekonomi, volume perdagangan global juga tercatat membaik seiring dengan mulai beroperasinya beberapa industri, hal ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Timah dan CPO. Serta Stimulus Fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan terhadap UMKM merupakan kebijakan moneter yang akomodatif mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diwujudkan pada periode 2017-2022 yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu:

1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan visi dan misi tersebut untuk mendukung program Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dituangkan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Sekretariat

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang Bersumber dari Dana Dekonsentrasi (APBN)

- Perencanaan dan Penganggaran

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD

- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal

Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBN

- Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
- Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- Penyuluhan Sosial Kementrian Sosial

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Pant
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Pant
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza didalam Pant



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD
 - Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBN
 - Penanggulangan Fakir Miskin Wilayah I
- f. Program Penanganan Bencana
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN
 - Penanggulangan Fakir Miskin Wilayah I
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Jaminan Sosial Keluarga
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- h. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
 - Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi
- i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBS)
 - Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- k. Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)
- Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar didalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBL Hijrah)
- Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- m. Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBL Hijrah)
- Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti

Untuk itu pola pembelanjaan yang diterapkan dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan efektifitas dan efesiensi belanja. Total Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.22.760.090.120,95 dengan estimasi 98,70% untuk belanja Operasi atau sebesar Rp.22.464.406.020,95 dan 1,30% untuk belanja Modal atau sebesar Rp. 295.684.100,00. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, barang, hibah, dan bantuan sosial sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin serta Belanja Bangunan dan Gedung. Beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Operasi

Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja daerah antara lain:

1. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai ASN;
4. Iuran BPJS Kesehatan dihitung sebesar 4% dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga;
5. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung sebesar 0.96% dari jumlah Gaji Pokok terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.24% dan Jaminan Kematian 0.72%;
6. Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka prestasi kerja motivasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan telah disetujui oleh DPRD;
7. Masing-masing PD agar melampirkan jumlah PNSD berdasar golongan dan jabatan serta jumlah pegawai tidak tetap.
8. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan
9. Alokasi belanja untuk Honorer/ Pegawai Tidak Tetap yang menunjang pelaksanaan kegiatan (kegiatan non fisik) dibebankan pada belanja barang dan jasa dan untuk Pegawai Tidak Tetap yang merupakan

belanja penunjang untuk perolehan aset tetap (kegiatan fisik) dibebankan pada belanja modal

10. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dalam jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud serta menggunakan sistem at cost (transportasi dan penginapan)
12. Biaya penyusunan DED dan atau AMDAL yang pengangggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pengadaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa
13. Pada Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga harus mencantumkan nama penerima dan bantuan sesuai dengan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait

b. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan dalam penyusunan belanja modal antara lain :

7. Dalam setiap kegiatan tidak diperkenankan untuk menganggarkan Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (komputer, laptop, notebook, ipad, dll) namun disatukan dalam kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
8. Tidak diperkenankan untuk menganggarkan Belanja Modal yang berbentuk penyediaan kendaraan dinas baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bidang sosial yang mencakup pelayanan dan rehabilitasi sosial, penanganan bencana, bantuan dan

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan intervensi sosial secara khusus dan terpadu, pentaan desa, fasilitasi administrasi, keuangan dan asset desa, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, kerjasama dan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pemerintah bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang diberi tanggungjawab dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda Keuangan) yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. SIMDA Keuangan Daerah dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya sejak tahun 2015 semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran sebelumnya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
3. Persediaan
4. Aset Tetap
5. Kewajiban Jangka Pendek
6. Kewajiban Jangka Panjang
7. Ekuitas

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas. Penyajian LO mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.74 Tahun 2014.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.74 Tahun 2014.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan,
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun untuk menyajikan penjelasan mengenai nilai satu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Kebijakan akuntansi juga harus dipedomani oleh fungsi-fungsi di Pemda, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusunan APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

A.4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyajikan laporan keuangan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan entitas pelaporan yang harus menyajikan laporan keuangan setiap tahunnya yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan selama satu tahun periode pelaporan.

A.4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Basis akuntansi pada laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

A.4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Kebijakan pengakuan belanja sebagai berikut:

Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Belanja sebagai berikut:

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penilaian belanja sebagai berikut:

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

Pengungkapan belanja sebagai berikut:

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per SKPD.
Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kebijakan pengakuan Beban adalah sebagai berikut:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu :

b. Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

c. Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

Pengukuran Beban sebagai berikut:

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Penilaian Beban sebagai berikut:

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Pengungkapan Beban sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

a. Rincian beban per SKPD.

Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.

b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Aset Lancar**

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2. Berupa kas dan setara kas.

a. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang dan persediaan.

b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing



disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- c. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 2. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
 3. Uang tunai di bendahara umum daerah.
- d. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- e. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; dan
 4. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

- **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk dipelihara
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

c. Penilaian Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Aset yang dibangun sendiri, diukur dengan cara pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya yang dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
6. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dipakai. Nilai tanah juga



meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

7. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar atau harga taksiran pada saat perolehan.
8. Tidak ada nilai satuan minimum untuk tanah, sehingga berapa pun nilai tanah dikapitalisasi.
9. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
10. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, serta pajak.
11. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
12. Gedung dan bangunan dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp.25.000.000,00 dan yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap.



13. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
14. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta pajak.
15. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, pajak, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.
16. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
17. Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp.1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap.
18. Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan kurang dari Rp.300.000,00 tidak dikapitalisasi.
19. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

20. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran bangunan lama.
21. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran bangunan lama.
22. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
23. Tidak ada nilai satuan minimum untuk jalan, irigasi dan jaringan sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi.
24. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
25. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
26. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.
27. Tidak ada nilai satuan minimum untuk aset tetap lainnya sehingga berapa pun nilainya dikapitalisasi.
28. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

29. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

30. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

31. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

32. Batasan jumlah biaya tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Formula perhitungan penyusutan barang milik daerah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

1. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 30 Juni 2021 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2021. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2021 menggunakan nilai perolehan; dan
3. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	Bangunan Menara	40
1	3	3	03	Bangunan Bersejarah	50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1	3	3	04	Tugu Peringatan	50
1	3	3	05	Candi	50
1	3	3	06	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	07	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	08	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	09	Rambu-Rambu	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- e. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

f. **Penghentian dan Pelepasan**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap



yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca:

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

2. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan
 2. Pelepasan
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan
 2. Metode penyusutan yang digunakan.
 3. Masa manfaat / tarif penyusutan yang digunakan.
 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.

2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

4. Kewajiban

Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai :

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- c. Pengukuran kewajiban sebagai berikut:
 1. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
 2. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

5. Ekuitas

1. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

A.4.4 PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2017 tanggal November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77

Tahun 2017 tanggal November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disesuaikan.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2021, untuk menerapkan basis akrual pada laporan keuangan, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tetap menggunakan aplikasi SIMDA. Untuk itu semua data-data yang berhubungan dengan keuangan harus dilakukan penginputan pada aplikasi SIMDA.

Dalam upaya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA telah diselenggarakan sosialisasi tentang akuntansi berbasis akrual kepada pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, pelatihan penggunaan SIMDA bagi PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan seluruh operator SIMDA di SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Diklat Penyusunan Laporan Keuangan serta Rekonsiliasi Realisasi Laporan Keuangan tahun anggaran 2021.

Laporan Keuangan Semester I Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada sebagai berikut:

1. Penerapan basis akrual pada Laporan Keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;
2. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas;
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disusun berdasarkan basis akrual;
4. Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

5. Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB II

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Mengenai indikator, target dan capaian program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 1
Program dan Kegiatan
Beserta Indikator, Target dan Capaian Kinerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2021 s.d. 31 Desember 2021

Program	Kegiatan	Indikator	Kinerja	
			Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (DINSOSPMD)	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Keluaran: Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Hasil: Nilai sakin perangkat daerah	7 Dok	7 Dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran: Survey Kepuasan Pelayanan keuangan perangkat daerah Hasil: Survey kepuasan pelayanan internal	77.7 %	77.7%
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Keluaran: Survey kepuasan pelayanan keuangan perangkat daerah Hasil: Survey kepuasan pelayanan internal	90%	90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan Hasil: Survey Kepuasan Pelayanan Internal	100%	100%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Keluaran: Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan Hasil: Survey kepuasan pelayanan internal	90%	100%
	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Keluaran: Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	22 Unit	13 Unit
		Hasil: Survey kepuasan pelayanan internal	90%	59,09%
			65 Orang	65 Orang
			100%	100%
			13 Unit	10 Unit
		Hasil: Survey kepuasan pelayanan internal	90%	87,50%
Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan sumbangan Lintas daerah kab/kota Dalam 1 (satu) daerah provinsi	Keluaran: Jumlah penyelenggara dunia Usaha/lembaga/masyarakat yg Diterbitkan izin dan Berpartisipasi menyelenggarakan Pengumpulan uang/ barang dan undian gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku Hasil: Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS	2 LMBG	2 LMBG
	Pemberdayaan Potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi	Keluaran: Jumlah PSKS yang diberdayakan	100%	100%
			203 Org	193 Org



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Hasil: Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS	100%	95.07%
Program Penanganan warga Negara migran Korban tindak kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban Tindak kekerasan dari Titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah kab/kota asal	Keluaran, Jumlah warga Negara migran Korban tindak kekerasan dari Titik debarkasi di daerah provinsi yang dipulangkan ke daerah kab/kota asal Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0 Org %	0 Org %
Program rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar didalam panti	Keluaran, Jumlah penyandang Disabilitas yang direhab sosial Didalam panti non pemerintah	37 Org	40 Org
		Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Keluaran, Jumlah anak terlantar yang Direhab sosial di dalam panti non pemerintah Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100% 4 Org 100%	108,11% 4 Org 100%
	Rehabilitasi sosial dasar	Keluaran,		
	Lanjut usia terlantar Didalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar Yang direhab sosial di dalam Panti non pemerintah	10 Org	10 Org
		Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Keluaran, Jumlah gelandangan dan Pengemis yang direhab sosial Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100% 10 Org 100%	100% 5 Org 50%
	Rehabilitasi sosial dasar Gelandangan dan Pengemis didalam panti	Keluaran, Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti	3 Org	2 Org
		Hasil: Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Keluaran, Jumlah anak yang mendapat Kan perlindungan sosial Hasil:	100% 13 Org	66,67% 13 Org
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan anak Antar WNI dan Pengangkatan anak oleh Orang tua tunggal			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Keluaran, Jumlah data fakir miskin Yang dikelola dengan baik Hasil: Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial Keluaran, Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan perlindungan	100% 80000 KK 100% 157 Org	100% 80000 KK 100% 126 Org
Program Penanganan Bencana	Pengelolaan data fakir Miskin cakupan daerah provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi			
		Dan jaminan sosial Hasil: Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Keluaran, Jumlah TMP yang dikelola Hasil: Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1 TMP 100%	1 TMP 100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBS)	Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran, Survey Kepuasan pelayanan Umum di PSBS Hasil: Survey Kepuasan pelayanan internal di PSBS Keluaran, Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan Hasil Survey kepuasan pelayanan internal di PSBS Keluaran, Jumlah Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	90% 100% 4 JNS 100% 14 Org	90% 100% 4 JNS 100% 14Org
		Hasil Survey kepuasan pelayanan internal di PSBS	100%	100%
Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar didalam panti	Keluaran, Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Hasil, Survey Kepuasan pelayanan internal di PSBS Keluaran, Jumlah anak terlantar yang di Rehab sosial di dalam panti pemerintah Hasil: Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	16 Unit 100% 10 Klien 100%	14 Unit 87,50% 3 Klien 30%



	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di dalam panti	sosial <u>Keluaran,</u> Jumlah Lanjut usia terlantar Yang direhab sosial didalam Panti pemerintah <u>Hasil:</u> Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	10 Klien 100%	12 Klien 120%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBL Hijrah)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	<u>Keluaran,</u> Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah yang tersusun dan terevaluasi di PSBL <u>Hasil:</u> Nilai Sakip perangkat daerah	10 Org 100%	10 Org 100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Keluaran,</u> Survey Kepuasan pelayanan Umum di PSBL <u>Hasil:</u> Survey Kepuasan pelayanan internal di PSBL	90% 90%	90% 90%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran,</u> Jumlah Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan <u>Hasil:</u> Survey Kepuasan pelayanan internal di PSBL	12 Org 100%	12 Org 100%
Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBL Hijrah)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Keluaran,</u> Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara <u>Hasil,</u> Survey Kepuasan pelayanan internal di PSBL	14 Unit 100%	14 Unit 100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar didalam panti	<u>Keluaran,</u> Jumlah Penyandang disabilitas yang direhab sosial dalam panti pemerintah <u>Hasil</u> Persentase penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	20 Org 100%	25 Org 125%
Program Pemberdayaan Lembaga	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak Dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	<u>Keluaran,</u> Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina <u>Hasil,</u> Persentase lembaga kemasyarakatan Yang terbina	309 desa 100%	309 desa 100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah desa	<u>Keluaran,</u> Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang sesuai dengan peraturan Yang berlaku <u>Hasil,</u> Persentase Penyelenggara Pemerintah Desas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	7 Kab/Kota 100%	7 Kab/Kota 100%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antardesa Yang menjadi kewenangan Provinsi	<u>Keluaran,</u> Jumlah kerjasama antar desa Kewenangan provinsi yang terlaksana <u>Hasil,</u> Persentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan	3 kerjasama 100%	3 kerjasama 100%



Secara umum, pengelolaan keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 belum menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari kondisi makro saat ini yang sedang terkena dampak dari Covid-19 dan juga dikarenakan baru dilakukannya penggabungan OPD yang mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan menghambat pelaksanaan kegiatan . Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 80,26 persen dari anggaran sebesar Rp. 22.760.090.120,95 dengan realisasi sebesar Rp.18.267.317.728,00. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 9 program dengan 31 kegiatan. Realisasi belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi
Belanja Operasional dan Belanja Modal
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	T.A. 2021				T.A. 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Operasi	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	80,63	4.350.898.292,95	0,00	0,00	18.113.507.728,00
Belanja Modal	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02	141.874.100,00	0,00	0,00	153.810.000,00
Jumlah	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	80,26	4.492.772.392,95	0,00	0,00	18.267.317.728,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.22.760.090.120,95 dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.18.267.317.728,00 atau 80,26 persen yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai pada Belanja Operasi
Belanja Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gaji, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai dengan anggaran sebesar Rp.11.789.963.477,95 dengan realisasi sampai dengan 31



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Desember 2021 sebesar Rp.9.404.623.798,00 atau 79,77 persen. Jumlah anggaran tahun 2021 ini didapat dari penggabungan anggaran 2 (Dua) OPD yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan adanya penambahan jumlah pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berasal dari mutasi antar OPD ,penerimaan CPNS dan pengalihan status pegawai menjadi Fungsional sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 3

Target dan Realisasi Belanja pegawai pada Belanja Operasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desemberb 2021 dan 2020

No	Uraian Program	T.A. 2021				T.A. 2020		Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.314.110.181,95	4.526.773.519,00	85,18	787.336.662,95	0,00	0,00	4.526.773.519,00
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.485.071.919,00	3.164.591.040,00	90,80	320.480.879,00	0,00	0,00	3.164.591.040,00
	Tunjangan Keluarga	392.581.000,00	324.253.770,00	82,60	68.327.230,00	0,00	0,00	324.253.770,00
	Tunjangan Jabatan	233.919.994,00	194.065.000,00	82,96	39.854.994,00	0,00	0,00	194.065.000,00
	Tunjangan Fungsional	251.296.787,00	217.026.000,00	86,36	34.270.787,00	0,00	0,00	217.026.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	100.899.599,99	74.315.000,00	73,65	26.584.599,99	0,00	0,00	74.315.000,00
	Tunjangan Beras	278.941.452,00	204.514.080,00	73,32	74.427.372,00	0,00	0,00	204.514.080,00
	Tunjangan PPH/ Khusus	19.601.485,96	18.817.982,00	96,00	783.503,96	0,00	0,00	18.817.982,00
	Pembulatan Gaji	122.168,00	49.658,00	40,65	72.510,00	0,00	0,00	49.658,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	477.099.093,00	303.327.944,00	63,58	173.771.149,00	0,00	0,00	303.327.944,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.176.685,00	6.453.217,00	39,89	9.723.468,00	0,00	0,00	6.453.217,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.999.998,00	19.359.828,00	0,00	4.240.170,00	0,00	0,00	19.359.828,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan rakyat ASN	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.870.051.796,00	4.742.625.279,00	0,00	1.127.426.517,00	0,00	0,00	4.742.625.279,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.429.025.898,00	1.257.659.694,00	0,00	171.366.204,00	0,00	0,00	1.257.659.694,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN	1.429.025.898,00	1.214.880.663,00	85,01	214.145.235,00	0,00	0,00	1.214.880.663,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	1.266.000.000,00	909.556.279,00	71,84	356.443.721,00	0,00	0,00	909.556.279,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.746.000.000,00	1.360.528.643,00	77,92	385.471.357,00	0,00	0,00	1.360.528.643,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	605.801.500,00	135.225.000,00	0,00	470.576.500,00	0,00	0,00	135.225.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan	544.507.500,00	127.065.000,00	0,00	417.442.500,00	0,00	0,00	127.065.000,00
	Belanja Honorarium pengadaan Barang dan Jasa	61.294.000,00	8.160.000,00	0,00	53.134.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00
Jumlah		11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77	2.385.339.679,95	0,00	0,00	9.404.623.798,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsopmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

2. Belanja Hibah Pada Belanja Operasi

Belanja Hibah Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja kepada Badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.500.000.000,00 atau 100 persen.

Jumlah anggaran tahun 2021 ini didapat dari penggabungan anggaran 2 (Dua) OPD yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 4

**Target dan Realisasi
Belanja Hibah Pada Belanja Operasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung**

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	T.A. 2021				T.A. 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Jumlah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

3 . Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Operasi

Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Bansos Kepada Individu, Belanja Bansos Kepada Keluarga, Belanja Bansos Kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga Non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) dengan anggaran sebesar Rp.1.970.912.360,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.405.942.600,00 atau 71,33 persen.

Jumlah anggaran tahun 2021 ini didapat dari penggabungan anggaran 2 (Dua) OPD yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 5

Target dan Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Pada Belanja Operasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	T.A. 2021				T.A. 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Bansos Kepada Individu	311.114.000,00	260.184.000,00	83,63	50.930.000,00	0,00	0,00	260.184.000,00
Bansos Kepada Keluarga	1.454.090.400,00	950.577.600,00	65,37	503.512.800,00	0,00	0,00	950.577.600,00
Bansos kepada kelompok Masyarakat	200.207.960,00	195.181.000,00	97,49	5.026.960,00	0,00	0,00	195.181.000,00
Bansos kepada Lembaga Non pemerintahan (Bidang pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	564.969.760,00	0,00	0,00	1.405.942.600,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospromd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

4. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan, yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp.8.203.530.183.00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.802.941.330,00 atau 82,93 persen.

Jumlah anggaran tahun 2021 ini didapat dari penggabungan anggaran 2 (Dua) OPD yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dalam tabel di bawah:



Tabel 6

Target dan Realisasi

Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	T.A. 2021				T.A. 2020		Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Pakai Habis	2.044.930.652,00	1.664.925.001,00	81,42	380.005.651,00	0,00	0,00	1.664.925.001,00
Belanja barang Tak Habis Pakai	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa kantor	3.028.515.000,00	2.783.710.418,00	91,92	244.804.582,00	0,00	0,00	2.783.710.418,00
Belanja Sewa Peralatan dan mesin	243.734.483,00	195.921.800,00	80,38	47.812.683,00	0,00	0,00	195.921.800,00
Belanja sewa gedung dan bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	315.488.048,00	181.275.875,00	57,46	134.212.173,00	0,00	0,00	181.275.875,00
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	339.875.000,00	238.123.792,00	70,06	101.751.208,00	0,00	0,00	238.123.792,00
Belanja pemeliharaan Jalan,jaringan dan irigasi	24.500.000,00	19.601.485,00	80,01	4.898.515,00	0,00	0,00	19.601.485,00
Belanja perjalanan Dinas Dalam negeri	1.745.937.000,00	1.286.922.959,00	73,71	459.014.041,00	0,00	0,00	1.286.922.959,00
Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	432.700.000,00	408.460.000,00	94,40	24.240.000,00	0,00	0,00	408.460.000,00
Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	673.472.916,00	0,00	0,00	4.644.557.219,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

B. Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah realisasi anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.18.267.317.728,00 atau 80,26 persen.
2. Selanjutnya ikhtisar pencapaian target belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Belanja Langsung yang terdiri dari belanja Barang dan jasa serta belanja Modal yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021 dari masing-masing kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut:



Tabel 7

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ Berkurang	Persentase	
				Fisik	Keu
1	2	3	4		5
BELANJA	22.760.090.121,00	18.267.317.728,00	4.492.772.393,00	93,63	80,26
DINSOSPMD	20.700.099.300,00	16.634.681.642,00	4.066.617.668,00	87,88	80,36
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.673.921,00	50.169.850,00	24.484.071,00	100,00	67,21
Administrasi Keuangan perangkat daerah	11.789.963.478,00	9.404.623.798,00	2.385.339.680,00	100,00	79,77
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.176.977,00	94.375.000,00	77.338.977,00	59,09	54,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.670.625,00	456.396.533,00	113.274.092,00	85,71	81,55
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.538.676.538,00	1.460.527.898,00	78.148.640,00	95,00	94,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.907.587,00	238.728.786,00	125.178.801,00	87,50	65,60
Penerbitan dan Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(Satu) Daerah provinsi	16.643.550,00	16.731.000,00	2.912.550,00	100,00	84,38
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.802.923.865,00	1.432.004.954,00	370.918.911,00	95,00	79,43
Fasilitasi Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan Provinsi	70.342.794,00	52.656.500,00	17.686.294,00	0,00	74,86
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	154.268.381,00	135.712.650,00	18.555.731,00	100,00	87,97
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti	68.136.000,00	60.880.600,00	7.255.400,00	100,00	89,35
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	1.544.361.147,00	1.355.560.522,00	188.800.625,00	100,00	87,77
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	46.988.000,00	38.565.140,00	8.422.860,00	100,00	82,07
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	53.052.500,00	45.106.700,00	7.945.800,00	100,00	85,02
Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	24.330.000,00	19.090.000,00	5.240.000,00	80,00	78,46
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti	46.083.000,00	21.208.000,00	24.875.000,00	50,00	46,02
Pengangkatan Anak antar WNI dan pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	40.682.944,00	35.685.753,00	4.997.191,00	100,00	87,72
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi	1.667.158.360,00	1.157.128.600,00	510.029.760,00	89,38	69,41
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	472.466.000,00	386.242.892,00	86.223.108,00	82,00	81,75
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	192.056.633,00	174.166.466,00	17.890.167,00	100,00	90,68
PSBS	930.469.373,00	807.662.880,00	122.796.493,00	86,80	86,80
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	68.380.736,00	36.217.907,00	32.162.829,00	100,00	52,97
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	98.588.431,00	72.529.167,00	26.059.264,00	75,00	73,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.793.012,00	53.280.000,00	4.513.012,00	100,00	92,19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.764.388,00	142.990.955,00	46.773.433,00	95,00	75,35
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.114.495.500,00	3.081.405.000,00	3.309.000,00	93,33	98,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.483.306,00	194.504.331,00	9.978.975,00	89,50	95,12
PSBLH	1.129.631.448,00	826.073.206,00	304.468.242,00	90,98	73,05
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	476.795.073,00	404.576.921,00	72.218.152,00	91,60	84,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.087.936,00	36.395.000,00	20.692.936,00	100,00	63,75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.004.716,00	44.910.850,00	14.093.866,00	83,27	76,11
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.777.216,00	309.824.585,00	51.952.631,00	86,33	85,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.406.505,00	17.831.650,00	141.574.855,00	100,00	11,19
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.460.000,00	11.534.200,00	3.925.800,00	100,00	74,61



Adapun uraian singkat penyerapan anggaran per Program dan Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasional

- a. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. yang termasuk dalam Belanja operasi diantaranya adalah Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan Uang Representasi), , Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp.22.464.406.020,95 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.113.507.728,00 atau 80,63 persen.
- b. Anggaran Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp.22.760.090.120,95 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.267.317.728,00 atau 80,26 persen.
- c. Sasaran Belanja Pegawai adalah pegawai ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berjumlah 135 orang terdiri dari golongan IV berjumlah 23 orang, golongan III berjumlah 99 orang dan golongan II berjumlah 13 orang, serta tunjangan suami/ istri berjumlah 107 orang, tunjangan anak berjumlah 179 orang. Adapun tunjangan jabatan untuk jabatan dengan eselon II.a berjumlah 1 orang, Eselon III.a berjumlah 6 orang, Eselon III.b berjumlah 2 orang dan eselon IV berjumlah 24 orang.

Sementara untuk tambahan penghasilan pegawai dibayarkan kepada pegawai ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berdasarkan beban kerja berjumlah 135 orang terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 orang, Sekretaris berjumlah 1 orang, Kepala Bidang berjumlah 5 orang, Kepala UPTD berjumlah 2 orang, Kasubag pada Sekretariat berjumlah 2 orang, Sub Koordinator berjumlah 20 orang dan kasubag TU 2 orang serta Staf Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Desa berjumlah 105 orang.

- d. Hambatan: dikarenakan anggaran yang disediakan untuk Belanja Pegawai hanya cukup untuk kebutuhan jumlah pegawai yang ada saat ini, maka apabila ada mutasi pegawai dari OPD lain yang masuk ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran berjalan maka secara otomatis harus merubah dan menambah anggaran pada DPA tahun anggaran 2021.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi diantaranya adalah belanja peralatan dan mesin dan belanja bangunan dan gedung . Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.295.684.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.153.810.000,00 atau 52,02 persen. Adapun realisasi kegiatan masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

❖ Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.498.606.126,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.11.704.841.865,00 atau 80.73 persen dan realisasi fisik sebesar 87.88 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8

Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per 31 Desember 2021

		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	7	7	Dokumen	74.673.921,00	50.189.650,00	67,21	100,00	24.484.071,00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	persen	559.670.625,00	456.396.533,00	81,55	85,71	103.274.092,00
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	22	13	Unit	171.713.977,00	94.375.000,00	54,96	59,09	77.338.977,00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65	65	orang	1.538.676.538,00	1.460.527.898,00	94,92	95,00	78.148.640,00
5.	Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	10	unit	363.907.587,00	238.728.786,00	65,60	87,50	125.178.801,00
6.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	90	90	persen	11.789.963.478,00	9.404.623.798,00	79,77	100,00	2.385.339.680,00
Jumlah		197		Persen	14.498.606.126,00	11.704.841.865,00	80,73	87,88	408.424.581,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan dibidang sosial yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif
- b. Hasil dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
- c. Target/ sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini sebesar Rp.74.673.923,00 realisasi keuangan sebesar Rp.50.189.850,00 atau 67,21 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
 2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari



sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c. Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.559.670.625,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.456.396.533,00 atau 81.55 persen dan realisasi fisik sebesar 85.71 persen.
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
 2. Penyediaan bahan Logistik kantor
 3. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Penyediaan Bahan Material
 5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 3. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
 - b. Hasil dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu terbayarnya honorarium panitia pelaksana, terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana



kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap perbaikan pelayanan publik tahun 2021.
- d. Anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini semula sebesar Rp.171.713.977,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.375.000,00 atau 54.96 persen dan realisasi fisik sebesar 59.09 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..
- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan, kebersihan dan supir, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah

terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.1.538.676.538,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.460.527.898,00 atau 94.92 persen dan realisasi fisik sebesar 95 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.363.907.587,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.238.728.786,00 atau 65.60 persen dan realisasi fisik sebesar 87.50 persen.

e. Kegiatan yang dilaksanakan:

1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

3.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

4.Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.004.953.415,00 dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,00 atau 0 persen dan realisasi fisik sebesar 0 persen

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pemberdayaan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9

**Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2	2	lembaga	18.643.550,00	15.731.000,00	84,38	100,00	2.912.550,00
2	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi	203	193	orang	1.802.923.865,00	1.432.004.954,00	79,43	95,00	370.918.911,00
Jumlah		100	0	Persen	1.821.567.415,00	1.447.735.954,00	79,48	97,50	373.831.461,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
 - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yaitu meningkatkan ketaatan penyelenggara dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang diterbitkan izin dan berpartisipasi menyelenggarakan pengumpulan uang/ barang dan undian gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Hasil dari kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yaitu meningkatnya persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS
 - c. Sasarannya adalah PSKS dan PMKS
 - d. Anggaran kegiatan Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi ini sebesar Rp.18.643.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.15.731.000,00 atau 84.38 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan: koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi**
 - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi yaitu meningkatkan penyelesaian masalah PMKS.
 - b. Hasil dari kegiatan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat yaitu meningkatnya persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi



- dalam penanganan PMKS
- c. Sasarannya adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - d. Anggaran kegiatan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat ini sebesar Rp.1.802.923.865,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.432.004.954,00 atau 79.43 persen dan realisasi fisik sebesar 95 persen
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan: Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.0,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 atau 0 persen dan realisasi fisik sebesar 0 persen

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan I dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10

Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/ Kota asal	0	0	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah		100	79,41	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



1. **Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal**
 - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal yaitu meningkatkan persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani
 - b. Hasil dari kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Sasarannya adalah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - d. Anggaran kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal ini sebesar Rp.0,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0 persen dan realisasi fisik sebesar 0 persen
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan: Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/ Kota asal
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ **Program Rehabilitasi Sosial**

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.238.589.500,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.184.850.440,00 atau 77.48 persen dan realisasi fisik sebesar 86 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11

**Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021**

		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti	10	19	Orang	68.136.000,00	60.880.600,00	89,35	100,00	7.255.400,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam panti	4	4	Orang	46.988.000,00	38.565.140,00	82,07	100,00	8.422.860,00
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut Usia Terlantar didalam panti	10	10	Orang	53.052.500,00	45.106.700,00	85,02	100,00	7.945.800,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	10	5	Orang	24.330.000,00	19.120.000,00	78,59	80,00	5.210.000,00
5	Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti	3	2	Orang	46.083.000,00	21.178.000,00	45,96	50,00	24.905.000,00
Jumlah		60	60	Orang	238.589.500,00	184.850.440,00	77,48	86,00	53.739.060,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk peningkatan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti, adalah : Penyandang Disabilitas
- d. Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti ini sebesar Rp.68.136.000,00

dengan realisasi sebesar Rp.60.880.600,00 atau 89.35 persen dan Realisasi fisik sebesar 100 persen.

e. Rincian Kegiatan

1. penyediaan Alat Bantu

2. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial

3. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah

b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

c. Sasarannya adalah Anak, pengurus panti, peksos, sakti peksos, Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan instansi terkait

d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti ini sebesar Rp.46.988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.38.565.140,00 atau 82.07 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.

e. Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pengasuhan

2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

3. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak

4. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar

5. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

6. Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga
 7. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah
 - b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Sasarannya adalah Lansia Terlantar yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
 - d. Anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti ini sebesar Rp.53.052.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.45.106.700,00 atau 85.02 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan: penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**
- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yaitu meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang direhab sosial



- b. Hasil dari Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yaitu Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Sasarannya adalah gelandangan dan pengemis
 - d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ini sebesar Rp.24.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.120.000,00 atau 78.59 persen dan realisasi fisik sebesar 80 persen
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Pemberian Bimbingan keterampilan Dasar
 - 2.Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta kelahiran, Surat Nikah dan/ atau identitas anak
 - 3.Pemulangan ke Daerah asal
 - 4.Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar didalam panti
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial
 - b. Hasil dari kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Sasarannya adalah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti ini sebesar Rp.46.083.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.208.000,00 atau 46.02 persen dan realisasi fisik sebesar 50 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar;
 - 2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta kelahiran, Surat Nikah dan/ atau identitas anak
 - 3.Pemulangan ke daerah asal
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.707.841.304,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.192.814.353,00 atau 69.84 persen dan realisasi fisik sebesar 94.69 persen.

Tabel 12

**Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Prov. Kep. Bangka Belitung
 s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%		
1	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	13	13	Orang	40.682.944,00	35.685.753,00	87,72	100,00	4.997.191,00
2	Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi	80000	80000	KK	1.667.158.360,00	1.157.128.600,00	69,41	89,38	510.029.760,00
Jumlah		100	100	persen	1.707.841.304,00	1.192.814.353,00	69,84	94,69	515.026.951,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

1. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu meningkatnya jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial
- b. Hasil dari Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal yaitu Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Balita terlantar, anak terlantar, TIM PIPA Prov, Sakti peksos, dan peksos fungsional
- d. Anggaran Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua tunggal ini sebesar Rp.40.682.944,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.685.753,00 atau 87.72 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan: Pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatkan jumlah data fakir miskin yang dikelola dengan baik
- b. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah keluarga miskin
- d. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi ini sebesar Rp.1.667.158.360,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.157.128.600,00 atau 69.41 persen dan realisasi fisik sebesar 89.38 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Fasilitas Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga
2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
3. Fasilitas Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:
adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan
anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Penanganan Bencana

Program penanganan bencana terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.472.466.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.386.242.892,00 atau 81,75 persen dan realisasi fisik sebesar 82%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Penanganan bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13

**Indikator Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021**

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial provinsi	157	126	Orang	472.466.000,00	386.242.892,00	81,75	82,00	86.223.108,00
Jumlah		100	100	persen	472.466.000,00	386.242.892,00	81,75	82,00	86.223.108,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

1. **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**
 - a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yaitu untuk Meningkatkan jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - b. Hasil dari kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yaitu: Meningkatkan persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan

jaminan sosial

- c. Anggaran kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi ini sebesar Rp.472.466.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.386.242.892,00 atau 81.75 persen dan realisasi fisik 82 persen.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan Permakanan
 - 2.Penyediaan Sandang
 - 3.Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4.Penanganan Khusus bagi kelompok rentan
- e. Sasarannya adalah PSKS, Korban Bencana Alam dan Sosial
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.192.056.633,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.174.166.456,00 atau 90.68 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung**

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	1	TMP	192.056.633,00	174.166.456,00	90,68	100,00	17.890.177,00
Jumlah		100	100	persen	192.056.633,00	174.166.456,00	90,68	0,00	17.890.177,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- a. Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yaitu untuk Meningkatkan jumlah TMP yang dikelola
- b. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yaitu Meningkatkan persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS
- c. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi ini sebesar Rp.192.056.633,00 dengan realisasi sebesar Rp.174.166.456,00 atau 90.68 persen dan realisasi fisik 100 persen.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- e. Sasarannya adalah Veteran/ Janda Veteran/ Warakawuri/ Perintis Kemerdekaan/ angkatan 1945/ pelajar di kota dan kabupaten
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.70.342.794,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.52.656.500,00 atau 74.86 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 15

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Fasilitasi Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan provinsi	3	3	orang	70.342.794,00	52.656.500,00	74,86	100,00	17.686.294,00
Jumlah		3	3	Orang	70.342.794,00	52.656.500,00	74,86	100,00	17.686.294,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan provinsi

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi yaitu untuk meningkatkan jumlah kerjasama desa yang menjadi kewenangan provinsi

Hasil dari Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi yaitu meningkatkan jumlah kerjasama desa yang menjadi kewenangan provinsi

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi ini sebesar Rp.70.342.794,00 dengan realisasi sebesar Rp.52.656.500,00 atau 74.86 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1.Penyediaan Barang dan jasa
- 2.Fasilitasi Rapat koordinasi kerjasama antar desa

Sasarannya adalah desa

Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD



❖ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.544.361.147,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.355.560.522,00 atau 87.77 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16

Indikator Kinerja Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	309	309	Desa	1.544.361.147,00	1.355.560.522,00	87,77	100,00	188.800.625,00
Jumlah		7	0	Kab	1.644.361.147,00	1.356.560.622,00	87,77	0,00	188.800.626,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan

Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk meningkatkan jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif

Hasil dari Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota yaitu meningkatkan jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif

Anggaran Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah Kabupaten/Kota ini sebesar Rp.1.544.361.147,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.355.560.522,00 atau 87.77 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1.Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ kelurahan, lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat
- 2.Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli
3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Sasarannya adalah lembaga masyarakat

Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.154.268.381,00 dengan realisasi



sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.135.712.650,00 atau 87.97 persen dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Administrasi Pemerintahan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17

Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7	7	Kab/ Kota	154.268.381,00	135.712.650,00	87,97	100,00	18.555.731,00
Jumlah		7	0	Kab	164.268.381,00	136.712.650,00	87,97	0,00	18.556.731,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hasil dari Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meningkatkan jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan

Anggaran Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini sebesar Rp.154.268.381,00 dengan realisasi sebesar Rp.135.712.650,00 atau 87.97 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1.Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 2.Monitoring Kegiatan Pemerintahan Desa

Sasarannya adalah Pemerintahan Desa

Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:



adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBS)

Program Rehabilitasi Sosial di PSBS terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.166.969.167,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.108.747.094,00 atau 65.13 persen dan realisasi fisik sebesar 87.50 persen. Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18

Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBS)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	10	3	Klien	68.380.736,00	36.217.907,00	52,97	100,00	32.162.829,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10	12	Klien	98.588.431,00	72.529.187,00	73,57	75,00	26.059.244,00
Jumlah		20	15	Klien	166.969.167,00	108.747.094,00	65,13	87,50	58.222.073,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah

b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan

perlindungan dan jaminan sosial

- c. Sasarannya adalah Anak, pengurus panti, peksos, sakti peksos, Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan instansi terkait
- d. Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti ini sebesar Rp.68.380.736,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.217.907,00 atau 52.97 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 2. Pengasuhan
 - 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - 4. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak
 - 5. Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar
 - 6. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - 7. Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga
 - 8. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah
- b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti yaitu meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Sasarannya adalah Lansia Terlantar yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
- d. Anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti ini sebesar Rp.98.588.431,00 dengan realisasi sebesar Rp.72.529.187,00 atau 73.57 persen dan realisasi fisik sebesar 75 persen.



- e. Kegiatan yang dilaksanakan:penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.763.490.206,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.698.915.786,00 atau 91.54 persen dan realisasi fisik sebesar 94.46 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	Persen	189.764.388,00	142.990.955,00	75,35	95,00	46.773.433,00
2	kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	4	4	Jenis	57.793.012,00	53.280.000,00	92,19	100,00	4.513.012,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14	14	Orang	311.449.500,00	308.140.500,00	98,94	93,33	3.309.000,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	16	14	Orang	204.483.306,00	194.504.331,00	95,12	89,50	9.978.975,00
Jumlah					763.490.206,00	698.915.786,00	91,54	94,46	64.574.420,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

**1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai PSBS Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.189.764.388,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.142.990.955,00 atau 75.35 persen dan realisasi fisik sebesar 95 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
 2. Penyediaan bahan Logistik kantor
 3. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Penyediaan Bahan Material
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

2. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu terbayarnya honorarium panitia pelaksana, terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap perbaikan pelayanan publik tahun 2021.
- d. Anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.57.793.012,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.53.280.000,00 atau 92.19 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan

prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..

- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan dan kebersihan, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.311.449.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.308.140.500,00 atau 98.94 persen dan realisasi fisik sebesar 93.33 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2.Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
 - 3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah



terhadap pelayanan Kesekretariatan.

- b. Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.204.483.306,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.194.504.331,00 atau 95.12 persen dan realisasi fisik sebesar 89.50 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 4.Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Rehabilitasi Sosial (UPTD PSBLH)

Program Rehabilitasi Sosial di PSBLH terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.476.795.073,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.404.576.921,00 atau 84.85 persen dan realisasi fisik sebesar 91.60 persen.



Pencapaian kinerja keuangan atas Program Rehabilitasi Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20
Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial (PSBLH)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	20	25	Orang	476.795.073,00	404.576.921,00	84,85	91,60	72.218.152,00
Jumlah		20	15	Klien	476.795.073,00	404.576.921,00	84,85	91,60	72.218.152,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

- 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial didalam panti non pemerintah
 - b. Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti yaitu untuk peningkatan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti, adalah : Penyandang Disabilitas
 - d. Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti ini sebesar Rp.476.795.073,00 dengan realisasi sebesar Rp.404.576.921,00 atau 84.85 persen dan Realisasi fisik sebesar 91.60 persen.
 - e. Rincian Kegiatan



- 1.penyediaan Alat Bantu
2. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial
3. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan:
adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan
anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.652.736.375,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.420.496.285,00 atau 64.42 persen dan realisasi fisik sebesar 91.99 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PSBS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prov. Kep. Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Lebih/ Kurang
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%	%	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	Persen	59.004.718,00	44.910.850,00	76,11	83,27	14.093.868,00
2	kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	9	7	Jenis	57.087.936,00	36.395.000,00	63,75	100,00	20.692.936,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12	12	Orang	361.777.216,00	309.824.585,00	85,64	88,33	51.952.631,00
4	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	10	10	Orang	15.460.000,00	11.534.200,00	74,61	88,33	3.925.800,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	14	14	Unit	159.406.505,00	17.831.650,00	11,19	100,00	141.574.855,00
Jumlah					652.736.375,00	420.496.285,00	64,42	91,99	232.240.090,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Target/ sasarannya adalah terpelihara dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran bagi seluruh pegawai PSBLH Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Anggaran kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah ini semula sebesar Rp.59.004.718,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.910.850,00 atau 76.11 persen dan realisasi fisik sebesar 83.27 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
 - 2.Penyediaan bahan Logistik kantor
 - 3.Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.Penyediaan Bahan Material
 - 5.Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

2. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu terbayarnya honorarium panitia pelaksana, terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap perbaikan pelayanan publik tahun 2021.
- d. Anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.57.087.936,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.395.000,00 atau 63.75 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan

prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan..

- b. Hasil dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu terbayarnya honorarium tenaga pelayanan umum, keamanan dan kebersihan, tersedianya sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.361.777.216,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.309.824.585,00 atau 85.64 persen dan realisasi fisik sebesar 88.33 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2.Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
 - 3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yaitu tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan serta terlaksananya kegiatan pelayanan kantor dalam mendukung tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah

- terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- b. Hasil dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta terpenuhinya sarana dan prasarana kantor berupa peralatan dan perlengkapan kantor .sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapainya tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
 - c. Sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
 - d. Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah ini semula sebesar Rp.159.406.505,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.831.650,00 atau 11.19 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
 - e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 4.Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD
- 5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan dibidang sosial yang berkualitas dan tepat waktu dengan

anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif

- b. Hasil dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
- c. Target/ sasarannya adalah tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan.
- d. Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini sebesar Rp.15.460.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.11.534.200,00 atau 74.61 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
 - 2.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- f. Hambatan dalam pencapaian target kegiatan dan keuangan: adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan anggaran belanja serta penggabungan 2 (Dua) OPD.

Dengan mendasari pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam kebijakan akuntansi belanja disebutkan bahwa belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan susunan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal

Belanja Operasi merupakan belanja barang dan jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan uang refresentasi),

belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial. realisasi belanja operasi s.d. 31 Desember 2021 mencapai Rp.18.113.507.728,00 atau 80,26 persen dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.22.464.406.020,95 dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Belanja Pegawai**, yaitu belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.11.789.963.477,95 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.404.623.798,00 atau 79,77 persen.
- b. **Belanja Barang dan jasa**, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan, yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp.8.203.530.183.00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.802.941.330,00 atau 82,93 persen.
- c. **Belanja Hibah**, merupakan pengeluaran anggaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp.500.000.000,00 atau 100 persen
- d. **Belanja Bantuan Sosial**, merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.1.970.912.360,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dengan realisasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.405.942.600,00 atau 71,33 persen

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi . Realisasi belanja modal s.d. 31 Desember 2021 mencapai Rp.153.810.000,00 atau 55,79 persen dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.275.684.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Belanja modal peralatan dan mesin**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan realisasi belanja modal s.d. 31 Desember 2021 mencapai Rp.153.810.000,00 atau 55,79 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp. 275.684.100,00.
 - b. **Belanja modal bangunan dan gedung**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap bangunan dan gedung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan realisasi belanja modal s.d. 31 Desember 2021 mencapai Rp.0,00 atau 0 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp. 20.000.000,00
3. Secara ringkas target dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 seperti yang tercantum dalam tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 22

**Perbandingan Target dan Realisasi Belanja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi	%	2020
Belanja				
Belanja Operasi	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	80,63	0,00
Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77	0,00
Belanja Barang dan Jasa	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	0,00
Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	0,00
Belanja Langsung	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02	0,00
Belanja Modal	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02	0,00
Jumlah	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	80,26	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020



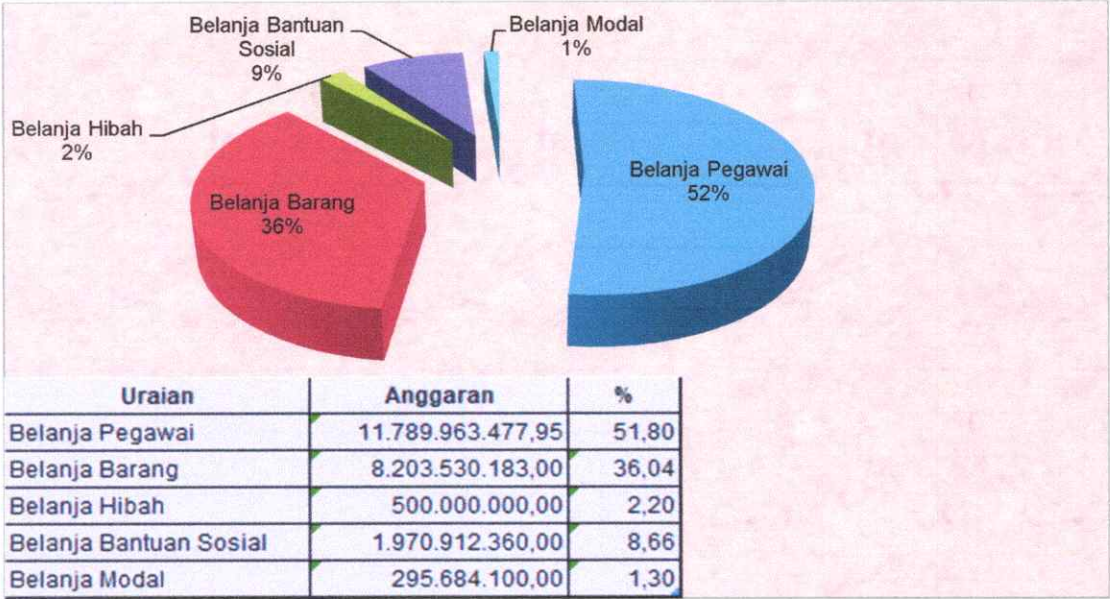
Grafik 1

Proporsi APBD

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021



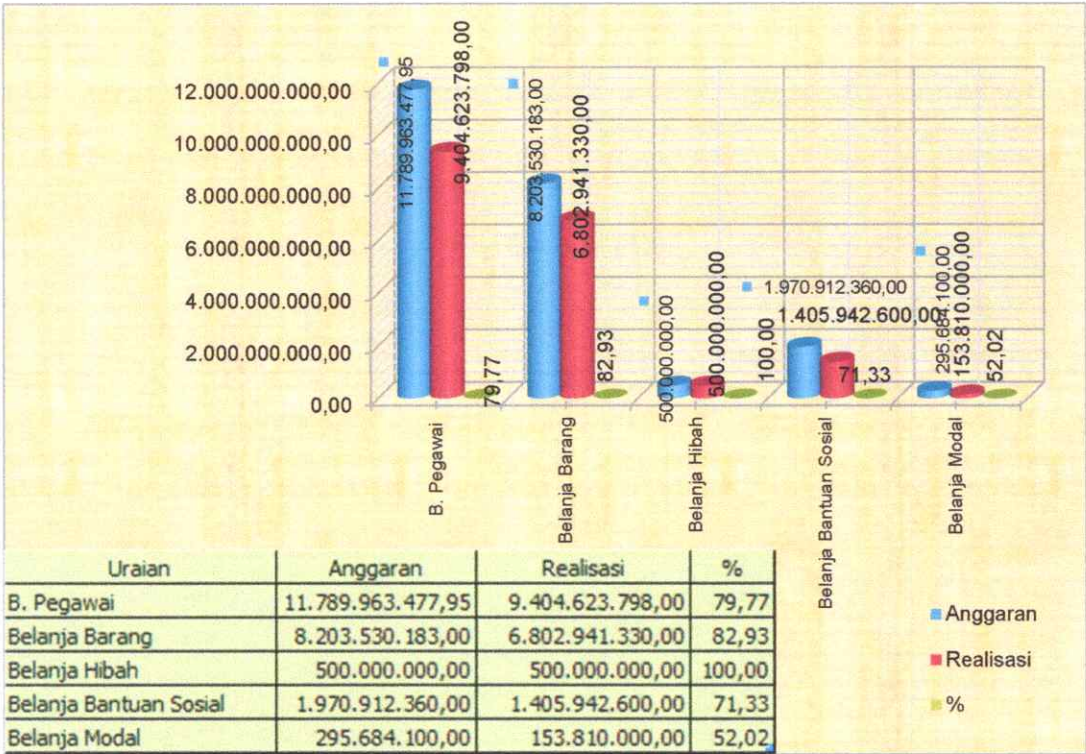
Sumber: DPA Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Grafik 2

Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.18.267.317.728,00 atau 80,26 persen dari anggaran sebesar Rp.22.760.090.120,95 dengan sisa anggaran sebesar Rp.4.492.772.392,95 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 23

Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Kep. Bangka Belitung
s.d. periode per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		
4	PENDAPATAN	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
4.1.2	Pendapatan Restribusi Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	80,26	0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	80,63	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	295.684.100,00	153.810.000,00	52,02	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.684.100,00	153.810.000,00	55,79	0,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT)		-22.758.830.120,95	-18.266.057.728,00	80,26	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-22.758.830.120,95	-18.266.057.728,00	80,26	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

B.2.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.260.000,00 dari anggaran Rp.1.260.000,00

Pendapatan ini berasal dari Retribusi Jasa Usaha (kantin) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021.

B.2.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan anggaran sebesar Rp.22.760.090.120,95 terdiri dari 35 kegiatan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 18.267.317.728,00 atau 80,26 persen.

Berdasarkan Permendagri 32 jenis kelompok belanja daerah yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.18.113.507.728,00 atau 80,63 persen dari anggaran sebesar Rp.22.464.406.020,95 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 153.810.000,00 atau 52,02 persen dari anggaran sebesar Rp.295.684.100,00 Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2021 serta realisasi tahun anggaran 2020 terinci pada tabel sebagai berikut:

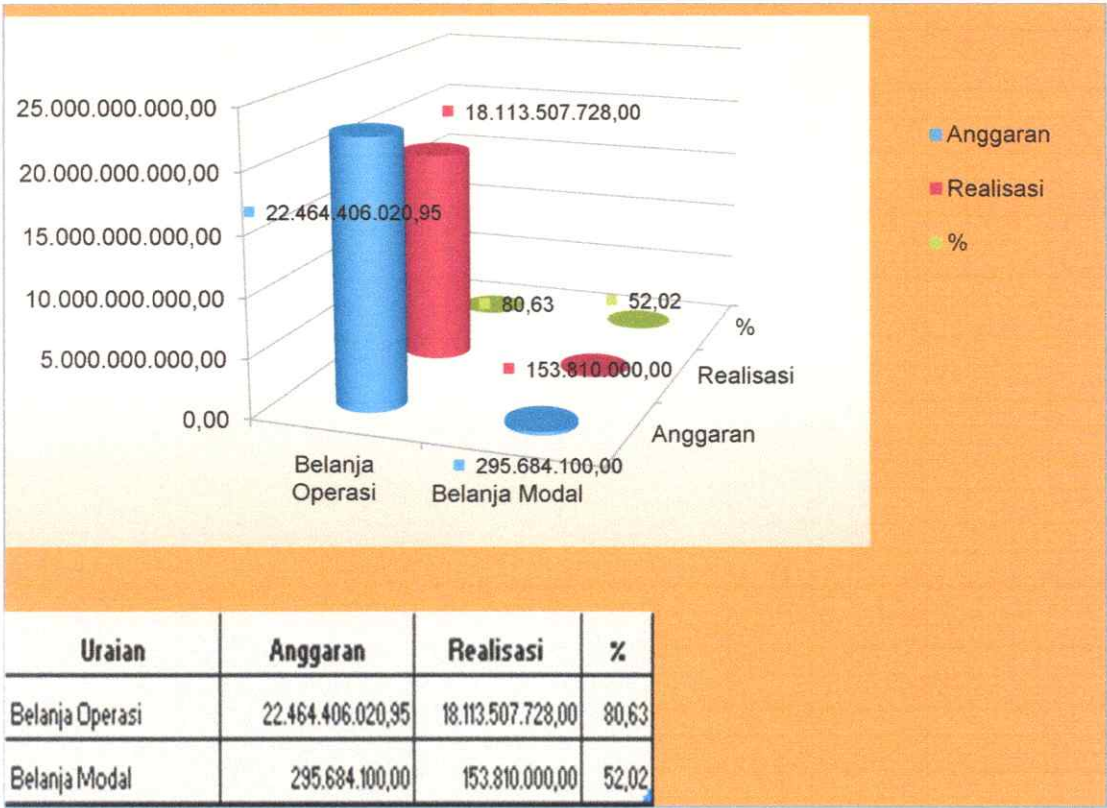
Tabel 24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021		2020	Kenaikan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ Kurang
2	BELANJA					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	0,00	80,63	18.113.507.728,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	0,00	79,77	9.404.623.798,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	0,00	82,93	
2.1.4	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	500.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	0,00	71,33	1.405.942.600,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	295.684.100,00	153.810.000,00	0,00	52,02	153.810.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.684.100,00	153.810.000,00	0,00	55,79	153.810.000,00
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	0,00	80,26	18.267.317.728,00

Sumber: LRA Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2022

Secara garis besar komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja dapat dilihat pada grafik 4 sebagai berikut:

Grafik 3
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021



Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi belanja s.d 31 Desember 2021 untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

B.2.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang terdiri dari belanja pegawai , belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial. realisasi belanja Operasi s.d. 31 Desember 2021 mencapai Rp.18.113.507.728,00 atau 80,63 persen dari anggaran belanja Operasi sebesar Rp.22.464.406.020,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	2021	2020	Lebih/ Kurng	%
2	Belanja					
2.1	Belanja Operasi	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	0,00	18.113.507.728,00	80,63
2.1.1	Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	0,00	9.404.623.798,00	79,77
2.1.2	Belanja Barang	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	0,00	6.802.941.330,00	82,93
2.1.5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	71,33
	Jumlah Belanja	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	0,00	18.113.507.728,00	80,63

Sumber: LRA Dinsospmid Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp.18.113.507.728,00 atau 80,63 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.22.464.406.020,95.

Belanja Operasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai (2.1.1.)

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akun belanja pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan dan Uang Makan dan Honorarium PNS/ Non PNS. Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 26

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021				2020	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	Realisasi (Rp)		
1	Gaji Pokok PNS	3.485.071.919,00	3.164.591.040,00	90,80	320.480.879,00	0,00	3.164.591.040,00	#DIV/0!
2	Tunjangan Keluarga	392.581.000,00	324.253.770,00	82,60	68.327.230,00	0,00	324.253.770,00	#DIV/0!
3	Tunjangan Jabatan Struktural	233.919.994,00	194.065.000,00	82,96	39.854.994,00	0,00	194.065.000,00	#DIV/0!
4	Tunjangan Fungsional	251.296.787,00	217.026.000,00	86,36	34.270.787,00	0,00	217.026.000,00	#DIV/0!
5	Tunjangan Fungsional Umum	100.899.599,99	74.315.000,00	73,65	26.584.599,99	0,00	74.315.000,00	#DIV/0!
6	Tunjangan Beras	278.941.452,00	204.514.080,00	73,32	74.427.372,00	0,00	204.514.080,00	#DIV/0!
7	Tunjangan PPH/ Khusus	19.601.485,96	18.817.982,00	96,00	783.503,96	0,00	18.817.982,00	#DIV/0!
8	Pembulatan Gaji	122.168,00	49.658,00	40,65	72.510,00	0,00	49.658,00	#DIV/0!
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	477.099.093,00	303.327.944,00	63,58	173.771.149,00	0,00	303.327.944,00	#DIV/0!
11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.176.685,00	6.453.217,00	39,89	9.723.468,00	0,00	6.453.217,00	#DIV/0!
12	Iuran Jaminan Kematian	23.599.998,00	19.359.828,00	82,03	4.240.170,00	0,00	19.359.828,00	#DIV/0!
13	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	1.429.025.898,00	1.257.659.694,00	88,01	171.366.204,00	0,00	1.257.659.694,00	#DIV/0!
15	Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.746.000.000,00	1.360.528.643,00	77,92	385.471.357,00	0,00	1.360.528.643,00	#DIV/0!
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	1.429.025.898,00	1.214.880.663,00	0,00	214.145.235,00	0,00	1.214.880.663,00	#DIV/0!
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	1.266.000.000,00	909.556.279,00	0,00	356.443.721,00	0,00	909.556.279,00	#DIV/0!
19	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	544.507.500,00	127.065.000,00	23,34	417.442.500,00	0,00	127.065.000,00	24,99
23	Honorarium Pengadaan barang/jasa	61.294.000,00	8.160.000,00	0,00	53.134.000,00	0,00	8.160.000,00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Pegawai		11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	79,77	2.385.339.679,95	0,00	9.404.623.798,00	#DIV/0!

Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.404.623.798,00 atau 79,77 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.385.339.679,95. Realisasi ini terutama digunakan untuk:

- a. Belanja Pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp9.269.398.798,00 dari anggaran sebesar Rp.11.184.161.977,95 ; diantaranya diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, iuran Jaminan Kesehatan BPJS, iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS, Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja dan Tambahan penghasilan Berdasarkan



Prestasi Kerja.

- b. Belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.135.225.000,00 dari anggaran sebesar Rp.605.801.500,00, diantaranya dalam bentuk honorarium PNS yang terdiri dari honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Belanja Hibah (2.1.2)

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp.500.000.000,00 atau 100 persen

Tabel 27

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021				2020
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Realisasi
Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

C. Belanja Bantuan Sosial (2.1.3)

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.1.970.912.360,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.405.942.600,00 atau 71,33 persen

Tabel 28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021				2020
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	564.969.760,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada individu	311.114.000,00	260.184.000,00	83,63	50.930.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada keluarga	1.454.090.400,00	950.577.600,00	65,37	503.512.800,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial barang Yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	200.207.960,00	195.181.000,00	97,49	5.026.960,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial uang Yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	71,33	564.969.760,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

D. Belanja Barang dan jasa (2.1.4)

Belanja Barang merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja.

Akun belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa pihak ketiga, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja premi asuransi, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja jasa konsultasi, belanja pemeliharaan, barang/ uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga,.

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.802.941.330,00 atau 82.93 persen dari anggaran sebesar Rp.8.203.352.183,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.400.688.863,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	s.d. 31 Desember 2021				2020
	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	1.400.588.853,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.044.930.652,00	1.664.925.001,00	81,42	380.005.651,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Belanja Jasa kantor	3.028.515.000,00	2.783.710.418,00	91,92	244.804.582,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	243.734.483,00	195.921.800,00	80,38	47.812.683,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315.488.048,00	181.275.875,00	57,46	134.212.173,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	339.875.000,00	238.123.792,00	70,06	101.751.208,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan irigasi	24.500.000,00	19.601.485,00	80,01	4.898.515,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	1.745.937.000,00	1.286.922.959,00	73,71	459.014.041,00	0,00
Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	432.700.000,00	408.460.000,00	94,40	24.240.000,00	0,00
Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Realisasi Belanja	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	82,93	1.400.588.853,00	0,00

Sumber: LRA Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Penurunan jumlah realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2021 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

Penurunan jumlah realisasi pada belanja barang pakai habis, belanja barang tak habis pakai, belanja jasa kantor , belanja sewa peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja perjalanan dinas, Barang/uang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga dan dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan di triwulan I dan refocusing anggaran serta penggabungan OPD.

B.2.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Akun belanja modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.153.810.000,00 atau 52,02 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam anggaran APBD 2021 sebesar Rp.295.684.100,00.

Belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari kelompok belanja modal peralatan dan mesin dan Belanja Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.153.810.000,00 atau 55,79 persen dari anggaran sebesar Rp.275.684.100,00. Anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0,00 atau 0 persen dari anggaran Rp.20.000.000,00 anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	s.d. 31 Desember 2021				2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Realisasi	
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	275.684.100,00	153.810.000,00	121.874.100,00	55,79	0,00	153.810.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	295.684.100,00	153.810.000,00	141.874.100,00	52,02	0,00	153.810.000,00

Sumber: LRA Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

B.3 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Dalam rangka pencairan dana, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PPK-SKPD dan oleh PPK-SKPD diverifikasi & dibuatkan SPM untuk mengajukan SP2D di BUD. Adapun SPP, SPM dan SP2D yang dapat direalisasikan s.d. 31 Desember 2021 terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- a. SPP/SPM-UP sebesar : Rp. 699.380.000,00
 - b. SPP/SPM-GU sebesar : Rp. 4.710.314.849,00
 - c. SPP/SPM-LS sebesar : Rp. 11.747.525.190,00
 - d. SPP/SPM-TU sebesar : Rp. 2.138.367.191,00
 - e. SPP/SPM-Nihil sebesar : Rp. 1.815.622.689,00
2. Pada tahun 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain melaksanakan “Belanja”, juga melaksanakan Pendapatan yaitu pada Pendapatan Restribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha (kantin kantor) sebesar Rp.180.000,00/ perbulan.
 3. Secara umum terdapat hambatan dan kendala yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam upaya mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021, diantaranya adalah:
 - a. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/ pendapatan Pemerintah Daerah. Hal ini berpengaruh pada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - b. Waktu yang tersedia untuk menyesuaikan perubahan rencana kerja sangat terbatas, akibatnya sering terjadi keteledoran dalam penyusunan finalisasi anggaran kegiatan.
 - c. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang dimiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau cost sharing serta penguatan/ pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian outcome kegiatan belum berjalan maksimal.
 - d. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/ bidang. Hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan

juga pemanfaatannya.

- e. Sering terjadi keterlambatan PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sehingga memperlambat proses pembuatan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran.
 - f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di bidang keuangan.
 - g. Sosialisasi mengenai peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa masih kurang serta belum tersampaikan secara optimal.
4. Adapun upaya mengatasi kendali/ permasalahan diatas antara lain:
- a. Pada saat penyusunan anggaran dan rencana kegiatan agar direncanakan sebaik mungkin dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi lagi efisiensi (perubahan) anggaran yang berulang kali.
 - b. Melakukan koordinasi, pengendalian dan penyampaian informasi kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan benar oleh PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran secepat mungkin.
 - c. Melaksanakan rapat setiap bulan dengan Pengelola Keuangan dan Kegiatan untuk mengetahui sejauh mana target keuangan dan fisik yang telah dicapai serta masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.
 - d. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam upaya peningkatan pengetahuan dalam bidang keuangan ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
 - e. Diharapkan perubahan anggaran tidak dilakukan beberapa kali serta dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana.
 - f. Meningkatkan koordinasi antara dinas/ kantor/ badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal lainnya.
 - h. Adanya pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Inspektorat Provinsi dan Bakuda secara rutin bagi semua pengelola keuangan daerah.
5. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat dana dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Dekonsentrasi untuk 6 Satker sebesar Rp.4.034.968.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.978.000.137,00 atau 98,59 persen

Tabel 31
Rincian Anggaran Dana Dekonsentrasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

No.	Satker	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Satker 300022	171.416.000	169.669.238	98,98	DK. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
2	Satker 309016	403.700.000	401.442.300	99,44	DK. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
3	Satker 309018	1.161.560.000	1.118.666.656	96,31	DK. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Satker 418865	181.640.000	179.133.500	98,62	DK. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
5	Satker 418981	1.162.580.000	1.155.412.050	99,38	DK. Program Penanganan Fakir Miskin
6	Satker 350410	954.072.000	953.676.393	99,96	DK. Program Pemrdayaan Masyarakat Desa
Total		4.034.968.000,00	3.978.000.137,00	98,59	

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Satker 300022)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Nomor DIPA 027.01.3.300022/2021 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu awal sebesar Rp.171.416.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.169.669.238,00 atau 98,98 persen.



No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	Program Dukungan Manajemen	171.416.000,00	169.669.238,00	98,98	1.746.762,00
Total		171.416.000,00	169.669.238,00	98,98	1.746.762,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

b. Program Pemberdayaan Sosial (Satker 309016)

Program Pemberdayaan Sosial dengan Nomor DIPA 027.03.3.309016/2021 yang terdiri dari 1 Program dengan pagu sebesar Rp.403.700.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.401.442.300,00 atau 99,44 persen.

No	Program	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	Program Pemberdayaan Sosial	403.700.000,00	401.442.300	99,44	2.257.700,00
Total		403.700.000,00	401.442.300,00	99,44	2.257.700,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satker 309018)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Nomor DIPA 027.05.3.309018/2021 yang terdiri dari 1 Program dengan pagu sebesar Rp.1.161.560.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.118.666.656,00 atau 96,31 persen.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	Program Perlindungan Sosial	1.161.560.000	1.118.666.656	96,31	42.893.344,00
Total		1.161.560.000,00	1.118.666.656,00	96,31	42.893.344,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

d. Program Penanganan Fakir Miskin (Satker 418981)

Program Penanganan Fakir Miskin dengan Nomor DIPA 027.06.3.418981/2021 yang terdiri dari 1 Program dengan pagu sebesar Rp.1.162.580.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.155.412.050,00 atau 99,38 persen.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	SISA
1	Penyelenggaraan Program Sembako	1.162.580.000	1.155.412.050	99,38	7.167.950,00
Total		1.162.580.000,00	1.155.412.050,00	99,38	7.167.950,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- e. Program Pendidikan, pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial (Satker 418865)

Program Pendidikan, pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial dengan Nomor DIPA 027.11.3.418865/2021 yang terdiri dari 1 program dengan pagu sebesar Rp.181.640.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.179.133.500,00 atau 98,62 persen.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan sosial	181.640.000,00	179.133.500,00	98,62	2.506.500,00
Total		181.640.000,00	179.133.500,00	98,62	2.506.500,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker 350410)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Nomor DIPA 067.03.3.350410/2021 yang terdiri dari 1 Program dengan pagu sebesar Rp.954.072.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.953.676.393,00 atau 99,96 persen.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	SISA
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	954.072.000	953.676.393	99,96	395.607,00
Total		954.072.000,00	953.676.393,00	99,96	395.607,00

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Dekonsentrasi s.d. 31 Desember 2021

6. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid-19 berupa Kegiatan Bantuan Sosial Pangan berupa Paket Sembako Bagi Keluarga Pasien Isolasi Terpadu Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebesar Rp.902.355.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 118.712.065,00 atau 13,16 persen

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	Bantuan sosial Pangan Bagi keluarga Pasien Isolasi Terpadu Dampak Corona Virus Disease 2019	902.355.000,00	118.712.065,00	13,16	783.642.935,00
Total		902.355.000,00	118.712.065,00	13,16	783.642.935,00



BAB III
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Secara ringkas, posisi Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 32
Posisi Neraca
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
ASET			
Aset Lancar	107.667.953,05	0,00	107.667.953,05
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	153.032,00	0,00	153.032,00
Persediaan	107.414.921,05	0,00	107.414.921,05
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	13.259.144.406,00	0,00	13.259.144.406,00
Tanah	407.800.656,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.135.307.229,00	0,00	7.135.307.229,00
Gedung dan Bangunan	14.520.919.616,00	0,00	14.520.919.616,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	396.032.673,00	0,00	396.032.673,00
Aset Tetap Lainnya	263.834.000,00	0,00	263.834.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-9.464.749.768,00	0,00	-9.464.749.768,00
Aset Lainnya	253.108.416,00	0,00	253.108.416,00
Aset Lain-lain	253.108.416,00	0,00	253.108.416,00
JUMLAH ASET	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00
Utang Belanja	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00
EKUITAS			
Ekuitas	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05
JUMLAH EKUITAS	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Posisi Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 menunjukkan adanya penambahan asset dari hasil penggabungan OPD , Hibah dari Pemerintah daerah lainnya yaitu kabupaten Belitung Timur dan ada penambahan asset dari pelaksanaan anggaran setelah OPD digabung sampai tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat terpengaruh oleh dampak dari Penggabungan OPD dan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya untuk Provinsi Bangka Belitung. Terhitung jumlah neraca setelah akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.(9.464.749.768,00).

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp.(9.464.749.768,00) adalah sebesar Rp.13.619.820.775,05. Nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33
Posisi Aset
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
	31 Desember 2021	2020	Rp
Aset			
Aset Lancar	107.567.953,05	0,00	107.567.953,05
Aset Tetap	22.723.894.174,00	0,00	22.723.894.174,00
Aset Lainnya	253.108.416,00	0,00	253.108.416,00
Akumulasi Penyusutan	-9.464.749.768,00	0,00	-9.464.749.768,00
Jumlah Aset	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

A. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas.

Nilai aset lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.107.567.953,05. Aset lancar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 34
Rincian Aset Lancar
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	
	(31 Desember 2021)	(31 Desember 2020)	Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	153.032,00	0,00	153.032,00	0,00
Persediaan	107.414.921,05	0,00	107.414.921,05	0,00
Jumlah Aset Lancar	107.567.953,05	0,00	107.567.953,05	0,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah sisa dana/ saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari sisa kas di rekening Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan yang masih belum disetor dan masih harus dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2021 baik berbentuk uang tunai, dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito.

Aset lancar yang masih dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.153.032,00.

Rincian lebih lanjut mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Des 2020
Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	153.032,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	3.032,00	0
- Rekening Koran s.d. 31 Desember 2021	3.032,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	150.000,00	0
SPJ Kegiatan yang Belum di pertanggungjawabkan (GU)	0,00	0
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	153.032,00	0,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Selama tahun anggaran 2021 sampai dengan periode 31 Desember 2021 untuk belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola melalui 3 rekening yang terdiri dari:

- a. Rekening atas nama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 144-30-10100 dengan saldo Rp.0,00 s.d tanggal 31 Desember 2021



- b. Rekening atas nama UPTD RPRS Dinas Rekening atas nama UPTD RPRS Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 144-30-10141 dengan saldo Rp.3.032,00 pada tanggal 31 Desember 2021
- c. Rekening atas nama UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah dengan Nomor: 016-330-20050 dengan saldo Rp.0,00 pada tanggal 31 Desember 2021

2. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sisa persediaan tahun 2021 senilai Rp.107.414.921,05 berupa alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan dan bahan pembersih, obat-obatan dan lain- lain yang belum habis digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36

Rincian Persediaan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Persediaan	31 Desember 2021	31 Des 2020	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
Persediaan Alat Tulis kantor	30.746.236,00	0,00	30.746.236,00
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	50.000,00	0,00	50.000,00
persediaan Alat Listrik dan Elektronik	356.490,00	0,00	356.490,00
Persediaan Bahan Bakar	0,01	0,00	0,01
Perserdiaan bahan obat-obatan	5.605.200,00	0,00	5.605.200,00
Persediaan Bahan Komputer	4.560.200,00	0,00	4.560.200,00
Persediaan Pakai habis Lainnya	10.234.900,00	0,00	10.234.900,00
Persediaan Tali asih,cinderamata,hadiah, piagam	43.505.000,00	0,00	43.505.000,00
Persediaan Perabot Kantor	2.604.800,00	0,00	2.604.800,00
Persediaan Kertas dan cover	978.095,00	0,00	978.095,00
Persediaan Klinik Kesehatan	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
Persediaan Perlengkapan Dinas	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,04	0,00	0,04
Jumlah Persediaan	107.414.921,05	0,00	107.414.921,05

Sumber: Stock Opname Barang Persediaan Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

Penjelasan lebih rinci mengenai jenis barang dari masing-masing jenis persediaan dapat dilihat pada lampiran Laporan pemeriksaan fisik Stock Opname Persediaan Barang Pakai Habis s.d. 31 Desember 2020.

Nilai persediaan diatas menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* yang merupakan hasil perhitungan dari:

Saldo persediaan barang habis pakai berupa saldo persediaan alat tulis kantor (ATK), alat listrik dan elektronik, bahan computer, pakai habis lainnya, perangko, materai, dan benda pos lainnya, kertas dan cover, perlengkapan dinas, klinik kesehatan, bahan obat-obatan, persediaan tali asih, cinderamata, hadiah dan piagam serta bahan makanan pokok di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UPTD PSBS dan UPTD Panti Bina Laras Hijrah yang diperoleh dari Sisa persediaan dari masing-masing OPD yang digabung Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari pengadaan atau belanja sampai dengan periode 31 Desember 2021, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terpakai habis.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki Investasi Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2021

C. ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.9.464.749.768,00 sebesar Rp.13.259.144.406,00 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Aset Tetap
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2020	2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
Aset Tetap			
Tanah	0,00	407.800.656,00	-407.800.656,00
Peralatan dan Mesin	0,00	7.135.307.229,00	-7.135.307.229,00
Gedung dan Bangunan	0,00	14.520.919.616,00	-14.520.919.616,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	396.032.673,00	-396.032.673,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	263.834.000,00	-263.834.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	22.723.894.174,00	-22.723.894.174,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	-9.464.749.768,00	9.464.749.768,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	13.259.144.406,00	-13.259.144.406,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Nilai aset per 31 Desember 2021 diperoleh dari penggabungan asset dari 2 OPD yang di gabungkan yakni Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengadaan tahun 2021 serta hibah dari Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp.22.723.894.174,00 sementara akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(9.464.749.768,00) sehingga posisi aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.13.259.144.406,00.

Penjelasan Per Kelompok Akun Aset Tetap

Penjelasan saldo masing-masing kelompok akun aset tetap per 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompok ke dalam Aset Tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan untuk bangunan gedung kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanah untuk bangunan gedung kantor dan asrama UPTD Panti Sosial Bina Serumpun dan tanah untuk bangunan gedung kantor dan asrama UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah Kabupaten Belitung Timur

Nilai saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.407.800.656,00 mengalami peningkatan bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.162.729.570,00.

Pada akhir tahun anggaran 2017 aset tanah baru tercatat dalam Neraca Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah nomor: 032/80/I.2017 tanggal 1 November 2017 atas tanah gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp.22.730.784,00 seluas 3.984 M² dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah nomor:032/81/I.2017 tanggal 1 November 2017 atas tanah asrama UPTD Panti Sosial Bina Serumpun senilai Rp.134.138.803,00 seluas 24.991 M².

Namun pada bulan Desember 2017 terdapat koreksi terhadap nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercatat di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor Berita Acara 590/051/I/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan pada 03 Juni 2021 terjadi penggabungan OPD antara Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga ada penambahan asset tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta ada Hibah tanah dari Kabupaten Belitung Timur dengan bukti Berita Acara Serah Terima Tambahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan, Urusan Kehutanan dan Urusan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 032/06/BA/I/2021 dan Nomor: 030/0014/I tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian nilai tanah yang tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan menjadi;



Uraian	Luas	Nilai Awal	Nilai Hasil Koreksi
Dinas SOSPMD I	± 3.984 M ²	22.730.784,00	24.641.107,00
UPTD PSBS	± 24.991 M ²	134.138.803,00	138.088.463,00
Dinas SOSPMD II	± 4.031 M ²	0,00	27.571.086,00
UPTD PSBLH	± 30.230 M ²	0,00	217.500.000,00
Jumlah	± 63.236 M ²	156.869.587,00	407.800.656,00

Sumber: Berita Acara Serah Terima Aset Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Secara rinci nilai aset tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

Penambahan aset Tanah:

Saldo Per 31 Desember 2020	Rp.	162.729.570,00
- Tanah PMD	Rp.	26.145.135,00
- Tanah dari kesbangpol	Rp.	27.571.086,00
- Hibah Tanah kantor dari Kab.Belitim	Rp.	217.500.000,00
Jumlah	Rp.	433.945.791,00

Pengurangan aset Tanah:

- Tanah PMD	Rp.	26.145.135,00
Jumlah Saldo Per 31 Desember 2021	Rp.	404.800.656,00

Dengan demikian tanah yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci sebagai berikut:

Uraian	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Status Tanah		Asal Usul	Harga
			Hak	Sertifikat		
Kantor Dinsospmd I Prov. Kep. Babel	3.984	2002	Hak Pakai	08/ Padang Baru 31 Desember 2009	Pembelian	24.641.107,00
UPTD PSBS	24.991	2002	Hak Pakai	70/Air Itam 31 Desember 2013	Pembelian	138.088.463,00
Kantor Dinsospmd II Prov. Kep. Babel	4.031	2.004	Hak Pakai	03/ Padang Baru 31 Desember 2009	Pembelian	27.571.086,00
UPTD PSBLH	30.230	2.008	Hak Pakai	29,07,02,04,4,000,4	Hibah	217.500.000,00



b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin sampai dengan periode Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.7.135.307.229,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.2.179.308.358,00 dibandingkan saldo awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.955.998.871,00, dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat-alat Besar Darat	22.453.000,00	2.200.000,00	151.508.000,00	0,00	176.161.000,00
Alat Angkutan	1.969.368.366,00	0,00	460.980.000,00	0,00	2.430.348.366,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.365.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	24.215.000,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	35.094.400,00	0,00	35.094.400,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.838.442.625,00	105.610.000,00	1.378.867.525,00	635.521.016,00	2.687.399.134,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	163.568.000,00	0,00	50.152.000,00	3.479.000,00	210.241.000,00
Alat Kedokteran dan Keseha	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00
Alat Laboratorium	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	806.866.880,00	46.000.000,00	581.421.449,00	7.375.000,00	1.426.913.329,00
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/ Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-Rambu	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Peralatan Olahraga	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah	4.955.998.871,00	153.810.000,00	2.671.873.374,00	646.375.016,00	7.135.307.229,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

Dengan demikian, penjelasan untuk masing-masing akun dalam Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Alat-alat Besar.....Rp.176.161.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Besar per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :



Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Des2020
Alat-alat Besar	22.453.000,00	2.200.000,00	151.508.000,00	0,00	176.161.000,00
Jumlah	22.453.000,00	2.200.000,00	151.508.000,00	0,00	176.161.000,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk dan belanja modal pada aset alat besar/berat. Rincian Alat-alat Besar sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Alat Besar dari PMD	11.700.000,00
Station Generating Set dari Kesbangpol	137.750.000,00
Mesin Pompa Air dari Kesbangpol	2.058.000,00
Mesin Pompa Air (Pengadaan 2021)	2.200.000,00
Jumlah	153.708.000,00

Alat Angkutan.....Rp.2.430.348.366,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Angkutan	1.969.368.366,00	0,00	460.980.000,00	0,00	2.430.348.366,00
Jumlah	1.969.368.366,00	0,00	460.980.000,00	0,00	2.430.348.366,00

Pada tahun 2021 terdapat *mutasi masuk* pada alat angkutan sehingga rincian Alat-alat Angkutan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Alat-alat Angkutan	Jumlah
Mini Bus	426.980.000,00
Sepeda Motor	34.000.000,00
Jumlah	460.980.000,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur.....Rp.24.215.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.365.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	24.215.000,00
Jumlah	10.365.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	24.215.000,00

Pada tahun 2021 terdapat *mutasi masuk* pada alat Bengkel dan Alat Ukur Rincian Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur sampai dengan 31Desember 2021 sebagai berikut:

Alat Bengkel dan Alat Ukur	Jumlah
Alat Penangkal Petir dari Kesbangpol	13.850.000,00
Jumlah	13.850.000,00

Alat Pertanian.....Rp.35.094.400,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Pertanian per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Pertanian	0,00	0,00	35.094.400,00	0,00	35.094.400,00
Jumlah	0,00	0,00	35.094.400,00	0,00	35.094.400,00

Pada tahun 2021 terdapat *mutasi masuk* pada alat Pertanian . Rincian Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur sampai dengan 31Desember 2021 sebagai berikut:

Alat Bengkel dan Alat Ukur	Jumlah
Lemari penyimpanan dari kesbangpol	35.094.400,00
Jumlah	35.094.400,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga.....Rp.2.687.399.134,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Kantor per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :



Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.838.442.625,00	105.610.000,00	1.378.867.525,00	635.521.016,00	2.687.399.134,00
Jumlah	1.838.442.625,00	105.610.000,00	1.378.867.525,00	635.521.016,00	2.687.399.134,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk, mutasi keluar serta pengadaan pada alat kantor dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah
Alat Kantor dan Rumah Tangga dari PMD	Rp 726.103.524
A C window dari Kesbangpol	Rp 12.900.000
A C window dari Kesbangpol	Rp 13.440.000
A C window dari Kesbangpol	Rp 110.180.000
A C window dari Kesbangpol	Rp 16.500.000
A C split dari Kesbangpol	Rp 3.000.000
Alat Kantor lainnya dari Kesbangpol	Rp 97.650.000
Dispenser dari Kesbangpol	Rp 6.750.000
Filling cabinet dari Kesbangpol	Rp 12.600.000
Filling cabinet dari Kesbangpol	Rp 2.750.000
Filling cabinet dari Kesbangpol	Rp 21875.000
Infocus dari Kesbangpol	Rp 4.000.000
Gordyn dari Kesbangpol	Rp 3.400.000
Kursi Pejabat ess II dari Kesbangpol	Rp 1950.000
Kursi Pejabat ess III dari Kesbangpol	Rp 6.750.000
Kursi Pejabat ess III dari Kesbangpol	Rp 16.500.000
Kursi Pejabat ess IV dari Kesbangpol	Rp 16.016.000
Kursi Kerja Non Struktural dari Kesbangpol	Rp 3.150.000
Kursi Kerja Non Struktural dari Kesbangpol	Rp 8.800.000
Kursi Tamu dari Kesbangpol	Rp 43.658.335
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 6.600.000
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 2.500.000
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 5.800.000
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 5.866.666
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 26.000.000
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 8.500.000
Lemari Besi dari Kesbangpol	Rp 9.000.000
Lemari es dari Kesbangpol	Rp 4.500.000
Lemari Kaca dari Kesbangpol	Rp 49.900.000
Meja Ess II dari Kesbangpol	Rp 3.160.000
Meja Ess III dari Kesbangpol	Rp 11500.000
Meja Ess III dari Kesbangpol	Rp 14.750.000
Meja Ess IV dari Kesbangpol	Rp 15.873.000
Meja kerja kayu dari Kesbangpol	Rp 26.250.000
Meja kerja kayu dari Kesbangpol	Rp 1300.000
Meja kerja kayu dari Kesbangpol	Rp 3.170.000
Mesin Absensi dari Kesbangpol	Rp 13.500.000
Meja Resepsionis dari Kesbangpol	Rp 1215.000
Rak Besi dari Kesbangpol	Rp 25.500.000
Sofa dari Kesbangpol	Rp 7.400.000
Televisi dari Kesbangpol	Rp 8.600.000
Jumlah	Rp 1.378.857.525



b. Mutasi Keluar

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah	
Mesin Absensi Ke Kesbangpol	Rp	9.300.000
Lemari Besi Ke Kesbangpol	Rp	3.361.000
Rak Kayu Ke Kesbangpol	Rp	2.062.000
Filling Cabinet Ke Kesbangpol	Rp	2.600.000
Lemari Kaca Ke Kesbangpol	Rp	2.200.000
CCTV Ke Kesbangpol	Rp	21.308.000
Meja Rapat Ke Kesbangpol	Rp	12.000.000
Meja Receptionsist Ke Kesbangpol	Rp	6.750.000
Meja Setengah Biro Ke Kesbangpol	Rp	7.563.500
Sofa Ke Kesbangpol	Rp	15.000.000
Ac Split Ke Kesbangpol	Rp	12.250.000
Karpet Ke Kesbangpol	Rp	2.500.000
Alat Rumah Tangga Lain-lain Ke Kesbangpol	Rp	70.450.000
Meja Kerja Pejabat Eselon II Ke Kesbangpol	Rp	3.446.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon II Ke Kesbangpol	Rp	6.790.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III Ke Kesbangpol	Rp	1.930.000
Televisi Ke Kesbangpol	Rp	2.450.000
Ac Split Ke Kesbangpol	Rp	77.815.416
Ac Windows Ke Kesbangpol	Rp	13.500.000
cctv ke Kesbangpol	Rp	28.365.000
Filling Kabinet Besi ke kesbangpol	Rp	40.134.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III Ke Kesbangpol	Rp	9.740.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Ke Kesbangpol	Rp	3.342.800
Lemari Besi Ke Kesbangpol	Rp	11.000.000
Lemari Besi Ke Kesbangpol	Rp	13.444.000
Lemari Besi Ke Kesbangpol	Rp	9.750.000
Lemari es Ke Kesbangpol	Rp	4.999.700
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	23.000.000
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	2.628.000
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	3.942.000
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	5.263.500
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	7.018.000
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	6.680.000
Meja kerja Pejabat eselon III Ke kesbangpol	Rp	5.750.000
Meja kerja Pejabat eselon IV Ke kesbangpol	Rp	8.580.000
Meja kerja Pejabat Lain-lain Ke kesbangpol	Rp	39.582.500
Rak Kayu Ke Kesbangpol	Rp	8.100.000
Sofa Ke Kesbangpol	Rp	49.975.000
Filing Kabinat Besi Ke kesbangpol	Rp	9.150.000
Meja 1/2 Biro Ke kesbangpol	Rp	8.800.000
Kursi Kerja Pejabat eselon III Ke kesbangpol	Rp	3.150.000
Kursi Kerja Pejabat eselon IV Ke kesbangpol	Rp	2.685.600
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Ke kesbangpol	Rp	24.375.000
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Ke kesbangpol	Rp	22.500.000
Kipas Angin	Rp	640.000
Alat Dapur Lainnya 9Blender	Rp	750.000
Gordyn	Rp	600.000
Pot Bunga	Rp	400.000
Teralis	Rp	3.500.000
Teralis	Rp	1.800.000
Teralis	Rp	1.500.000
Teralis	Rp	500.000
Teralis	Rp	600.000
Jumlah		635.521.016,00



c. **Pengadaan Tahun 2021**

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jum lah	
AC window	Rp	3.620.000
Kipas angin	Rp	640.000
Dispenser	Rp	3.400.000
Meja Kerja Pejabat Ess III	Rp	7.050.000
Meja Kerja Pejabat Ess III	Rp	2.485.000
Meja Kerja Pejabat Ess III	Rp	7.200.000
Meja Kerja Pejabat Ess III	Rp	2.600.000
Alat dapur lainnya (Blender)	Rp	750.000
Rice Cooker	Rp	1050.000
Mesin Pemotong Rumput	Rp	1700.000
Camera Video	Rp	4.500.000
Televisi	Rp	7.200.000
AC window	Rp	3.500.000
Lemari Es	Rp	3.680.000
Mesin Cuci	Rp	2.355.000
CCTV	Rp	21880.000
Gordyn	Rp	600.000
Pot Bunga	Rp	400.000
Lemari Kayu	Rp	7.000.000
Meja Resepsionis	Rp	4.000.000
Teralis	Rp	3.500.000
Teralis	Rp	1800.000
Teralis	Rp	1500.000
Teralis	Rp	500.000
Teralis	Rp	600.000
Teralis	Rp	3.000.000
Teralis	Rp	1800.000
Teralis	Rp	3.500.000
Teralis	Rp	3.800.000
Jum lah	Rp	105.610.000

Komputer.....Rp.1.426.913.329,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Komputer per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 juni 2021				31 Desember 2021
Komputer	806.866.880,00	46.000.000,00	581.421.449,00	7.375.000,00	1.426.913.329,00
Jumlah	806.866.880,00	46.000.000,00	581.421.449,00	7.375.000,00	1.426.913.329,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk, mutasi keluar serta pengadaan pada Komputer dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

a. Mutasi Masuk

Komputer	Jumlah
Komputer dari PMD	Rp 575.571.449
Router dari Kesbangpol	Rp 3.150.000
Peralatan Jaringan lainnya dari Kesbangpol	Rp 2.700.000
Jumlah	Rp 581.421.449

b. Mutasi Keluar

Komputer	Jumlah
Peralatan Personal Komputer lain	Rp 1.875.000
Peralatan Personal Komputer lain	Rp 5.500.000
Jumlah	Rp 7.375.000

c. Pengadaan

Komputer	Jumlah
Laptop	Rp 7.600.000
Laptop	Rp 15.000.000
Harddisk	Rp 2.700.000
Peralatan komputer lainnya (Memory programmer)	Rp 3.450.000
Printer	Rp 17.250.000
Jumlah	Rp 46.000.000

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.....Rp.210.241.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat Stud per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	163.568.000,00	0,00	50.152.000,00	3.479.000,00	210.241.000,00
Jumlah	163.568.000,00	0,00	50.152.000,00	3.479.000,00	210.241.000,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar pada alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Komputer	Jumlah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dari PMD	Rp 50.152.000
Jumlah	Rp 50.152.000



b. Mutasi Keluar

Komputer	Jumlah
Rak Peralatan ke Kesbangpol	Rp 3.479.000
Jumlah	Rp 3.479.000

Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan.....Rp.41.895.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Kedokteran dan Kesehatan	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00
Jumlah	41.895.000,00	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00

Alat Laboratorium.....Rp.81.740.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat laboratorium per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Alat Laboratorium	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00
Jumlah	81.740.000,00	0,00	0,00	0,00	81.740.000,00

Rambu-rambu.....Rp.17.000.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Rambu-rambu	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat pengadaan pada Rambu-rambu yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin dan mutasi masuk serta mutasi keluar.



Rincian alat laboratorium sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Rambu-rambu	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Selisih
Rambu Papan Tambahan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Jumlah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

Peralatan Olahraga.....Rp.4.300.000,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Peralatan Olahraga per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Peralatan Olahraga	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	4.300.000,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat pengadaan pada Peralatan Olahraga yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin dan mutasi masuk. Rincian peralatan olahraga sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Peralatan Olahraga	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Selisih
Peralatan Olahraga Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
Jumlah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.14.520.919.616,00 ada penambahan asset senilai Rp.2.969.200.800,00 bila dibandingkan saldo per 04 Juni 2021 sebesar Rp.11.551.718.816,00 dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	0 4 Juni 2021				31 Desember 2021
Bnagunan Gedung	11.042.718.266,00	0,00	5.145.910.120,00	2.002.685.320,00	14.185.943.066,00
Monumen	509.000.550,00	0,00	0,00	174.024.000,00	334.976.550,00
Jumlah	11.551.718.816,00	0,00	5.145.910.120,00	2.176.709.320,00	14.520.919.616,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Tidak ada Pengadaan pada tahun 2021 yang berasal dari belanja modal pembangunan Gedung dan Bangunan

Penambahan aset Gedung dan Bangunan:

Saldo Per 03 Juni 2021 Rp. 11.551.718.816,00

- Mutasi tambah Rp. 5.145.910.120,00

Jumlah Rp. 16.697.628.936,00

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan:

- Alih Status Penggunaan Rp. 2.002.685.320,00

- Penghapusan Rp. 0,00

- Reklasifikasi Rp. 174.024.000,00

Jumlah Rp. 2.176.709.320,00

Jumlah aset Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2021 Rp. 14.520.919.616,00

Bangunan GedungRp.14.185.943.066,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Bangunan Gedung	11.042.718.266,00	0,00	5.145.910.120,00	2.002.685.320,00	14.185.943.066,00
Jumlah		0,00	5.145.910.120,00	2.002.685.320,00	14.185.943.066,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk, mutasi keluar serta pengadaan pada Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Bangunan Gedung	Jumlah
Bangunan Gedung PM D	Rp 2.002.685.320
Gedung dan bangunan dari kesbangpol	Rp 2.290.518.800
Landscape Gedung kantor dari kesbangpol	Rp 332.737.000
Penyekatan ruang kerja dari kesbangpol	Rp 78.261.000
Gedung Mitigasi dari kesbangpol	Rp 81.840.000
Rumah jaga dari kesbangpol	Rp 96.731.000
Belakang gedung kantor dari kesbangpol	Rp 89.700.000
gedung tempat ibadah dari Kesbangpol	Rp 173.437.000
Jumlah	Rp 5.145.910.120



b. Mutasi Keluar

Bangunan Gedung	Jumlah
Bangunan Gedung kantor permanen ke kesbangpol	Rp 1665.523.320
Bangunan gedung kantor lain-lain ke kesbangpol	Rp 337.162.000
Jumlah	Rp 2.002.685.320

Monumen.....Rp.334.976.550,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Monumen per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Monumen	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Monumen	509.000.500,00	0,00	0,00	174.024.000,00	334.976.500,00
Jumlah		0,00	0,00	174.024.000,00	334.976.500,00

Pada tahun 2021 terdapat mutasi keluar pada monumen dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Keluar

Bangunan Gedung	Jumlah
Reklasifikasi Makam bersejarah	Rp 174.024.000
Jumlah	Rp 174.024.000

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.396.032.673,00 terdapat kenaikan dibandingkan saldo per 04 Juni 2021 sebesar Rp.339.550.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air	234.466.612,00	0,00	0,00	0,00	234.466.612,00
Instalasi	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00
Jaringan	0,00	0,00	104.081.750,00	47.600.000,00	56.481.750,00
Jumlah	339.550.923,00	0,00	104.081.750,00	47.600.000,00	396.032.673,00

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



- Tidak ada Pengadaan pada tahun 2021 yang berasal dari belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Saldo Awal Per 04 Juni 2021 Rp. 339.550.923,00

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Alih Status Penggunaan Rp. 47.600.000,00

- Hibah Rp. 56.481.750,00

Jumlah Rp. 104.081.750,00

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Alih Status Penggunaan Rp. 47.600.000,00

Jumlah Rp. 47.600.000,00

Jumlah s.d. 31 Desember 2021 Rp. 396.032.673,00

Dengan demikian, penjelasan untuk masing-masing akun dalam Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Selisih
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air	234.466.612,00	234.466.612,00	0,00
Instalasi	105.084.311,00	105.084.311,00	0,00
Jaringan	0,00	56.481.750,00	47.600.000,00
Jumlah	339.550.923,00	396.032.673,00	47.600.000,00

Bangunan Air.....Rp.234.466.612,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Bangunan Air per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Bangunan Air	234.466.612,00	0,00	0,00	0,00	234.466.612,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	234.466.612,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat pengadaan pada Air yang berasal dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.



Rincian Bangunan Air sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Banguan Air	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Selisih
Saluran Drainase	106.993.812,00	106.993.812,00	0,00
Sumur dengan Pompa	39.699.800,00	39.699.800,00	0,00
Sumur Artesis	25.773.000,00	25.773.000,00	0,00
Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
Jumlah	234.466.612,00	234.466.612,00	0,00

Instalasi.....Rp.105.084.311,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Instalasi	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00
Jumlah	105.084.311,00	0,00	0,00	0,00	105.084.311,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat pengadaan pada Instalasi yang berasal dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan mutasi masuk.

Rincian Instalasi sampai dengan 31Desember 2021 sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	04 Juni 2021	30 Juni 2021	Selisih
Sumur Gali	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
Sumur Resapan	1.120.311,00	1.120.311,00	0,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	84.284.000,00	84.284.000,00	0,00
Jumlah	105.084.311,00	105.084.311,00	0,00

Jaringan.....Rp.56.481.750,00

Nilai ini merupakan Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Jaringan	0,00	0,00	104.081.750,00	47.600.000,00	56.481.750,00
Jumlah	0,00	0,00	104.081.750,00	47.600.000,00	56.481.750,00



Pada tahun 2021 terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar pada alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Jalan,Irigasi dan Jaringan	Jumlah	
Jaringan Pembawa Lain-lain dari PMD	Rp	47.600.000
Hibah Jaringan Sambungan Kerumah dari Kab Beltim	Rp	23.810.000
Hibah Jaringan distribusi tegangan di atas 20 KVA dari Kab Beltim	Rp	19.734.050
Hibah Jaringan distribusi tegangan di bawah 1KVA dari Kab Beltim	Rp	12.937.700
Jumlah	Rp	104.081.750

b. Mutasi Keluar

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah	
Jaringan Pembawa Lain-lain ke Kesbangpol	Rp	47.600.000
Jumlah	Rp	47.600.000

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan yang sebelumnya Rp.61.460.000,00 menjadi Rp.263.834.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Aset Tetap lainnya	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/ olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Pahatan Batu-batuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/ olahraga	9.960.000,00	38.310.000,00	28.350.000,00
Alat Musik/ Band	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00
Buku Umum Lain-lain	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00
Aser Tetap Dalam Renovasi	0,00	174.024.000,00	174.024.000,00
Makam Bersejarah	0,00	174.024.000,00	174.024.000,00
Jumlah	61.460.000,00	263.834.000,00	202.374.000,00



Penambahan aset Tetap Lainnya:

Saldo Per 04 Juni 2021	Rp.	61.460.000,00
Penambahan aset Tetap Lainnya:		
- Alih Status Penggunaan	Rp.	28.350.000,00
- Reklasifikasi	Rp.	174.024.000,00
Jumlah	Rp.	202.374.000,00
Pengurangan aset Tetap Lainnya:		
- -	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Jumlah per 31Desember 2021	Rp.	263.834.000,00

Dengan demikian, penjelasan untuk masing-masing akun dalam Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	04 Juni 2021	31 Desember 2021
Dinas Sosial		
Barang Bercorak Kebudayaan/ Kesenian/Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
Pahatan Batu-batuan	6.000.000,00	6.000.000,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00
Tanaman	45.500.000,00	45.500.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan/ Kesenian/Olahraga	9.960.000,00	38.310.000,00
Alat Musik/ Band	9.960.000,00	9.960.000,00
Buku Perpustakaan	0,00	28.350.000,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	174.024.000,00
Makam Bersejarah	0,00	174.024.000,00
Jumlah	61.460.000,00	263.834.000,00

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00, tidak terdapat kenaikan/penurunan bila dibandingkan saldo per 04 Juni 2021 sebesar Rp.0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Saldo Awal	Pengadaan Tahun 2021	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021				31 Desember 2021
Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00	0,00	89.859.000,00	89.859.000,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	89.859.000,00	89.859.000,00	0,00

Jenis barang Konstruksi dalam pengerjaan ini berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-lain yang terletak di Jl.Pulau pongok Kel.Air Itam Kec.Bukit



Intan Pangkalpinang dengan Dokumen BASTB Nomor 05/BASTB/JK/DPMD/2019 Tanggal 23/12/2019 senilai Rp.89.859.000,00

g. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.

Sejak tahun 2015, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan penyusutan pada Barang Milik Daerah. Perbandingan akumulasi penyusutan per 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021:

Uraian	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2021	Semester I	Semester II	Akum Penyusutan 31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.920.313.567,00	236.215.220,00	225.879.891,00	6.382.408.678,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.646.855.898,00	140.267.325,00	140.267.323,00	2.927.390.546,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.686.368,00	8.563.944,00	27.700.232,00	154.950.544,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.685.855.833,00	385.046.489,00	393.847.446,00	9.464.749.768,00

Sumber: Laporan Penyusutan Aset Tetap Dinsospmd Prov. Kep. Bangka Belitung T.A. 2021

Nilai akumulasi penyusutan saldo akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.464.749.768,00 dan saldo awal 2021 sebesar Rp. 8.685.855.833,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.778.893.935,00

C. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.253.108.416,00 mengalami kenaikan dari tanggal 04 Juni 2021 yaitu sebesar Rp.44.810.000,00. Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:



Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
	04 Juni 2021			31 Desember 2021
alat kantor dan rumah tangga	44.810.000,00	229.811.724,00	21.513.308,00	253.108.416,00
- Mesin ketik Manual Standar	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Filling Besi	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
Brankas	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Alat penghancur kertas	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
PC Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Printer	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
Note Book	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Aset Lain lain PMD	0,00	221.561.724,00	16.713.308,00	204.848.416,00
AC window dari kesbangpol	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
Jumlah	44.810.000,00	229.811.724,00	21.513.308,00	253.108.416,00

Tabel 38

Rincian Aset Lainnya

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Aset Lainnya	Jumlah	04 Juni 2021	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
				Rp
Aset tak berwujud	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Software	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Aset Lain-lain	12	44.810.000,00	253.108.416,00	208.298.416,00
Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/Lainnya	12	44.810.000,00	253.108.416,00	208.298.416,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12	44.810.000,00	253.108.416,00	209.648.416,00
- Mesin Ketik Manual Standar	2	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00
- Filling Besi/ Metal	3	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
- Branskas	1	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
- Alat Penghancur Kertas	2	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
- PC Unit/ Komputer PC	2	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
- Note Book	1	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
- Printer	1	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
- PMD	1	0,00	204.848.416,00	204.848.416,00
- AC Window		0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
Jumlah Aset Lainnya	13	44.810.000,00	253.108.416,00	208.298.416,00
Amortisasi		-28.000.000,00	-28.000.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		-28.000.000,00	-28.000.000,00	0,00

Sumber: Laporan BMD dan Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel TA 2021



Saldo aset lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.253.108.416,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penambahan aset lainnya:

Saldo Per 04 Juni 2021	Rp.	44.810.000,00
- Mutasi Tambah	Rp.	208.298.416,00
- Aset Tak berwujud	Rp.	28.000.000,00
- Jumlah	Rp.	281.104.416

Pengurangan aset lainnya:

- Amortisasi	Rp.	28.000.000,00
Jumlah	Rp.	28.000.000,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp.	253.108.416,00

Penjelasan untuk masing-masing akun pada Aset Lainnya sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud terdiri atas aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan periode 31 Desember 2021 terdiri atas *Software Komputer* sebesar Rp.28.000.000,00 yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan masih diakui sebagai aset milik Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2017 terdapat akumulasi amortisasi pada aset tak berwujud sebesar Rp.28.000.000,00 namun akun Amortisasi tidak muncul dalam Neraca tetapi langsung mengurangi Aset Tidak Berwujud tersebut sebesar Rp.28.000.00,00 sehingga saldo Aset Tak Berwujud yang ditampilkan dalam Neraca sebesar Rp.0,00. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 39
Rincian Aset Tak Berwujud
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Aset Tak Berwujud	Per 04Juni 2021	Per 31 Desember 2021	Selisih
Aset Tak Berwujud	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Perangkat Lunak Sistem Operasi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-28.000.000,00	-28.000.000,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan BMD dan Neraca Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

b. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk dalam kondisi rusak berat/ hilang/ lainnya sebesar Rp.253.108.416,00 sehingga dikategorikan dan dicatat dalam kelompok aset rusak berat (RB).

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.253.108.416,00 terdapat penambahan Rp 208.298.416 persen dari Rp.44.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan aset lain-lain:

Saldo Per 04 Juni 2021	Rp.	44.810.000,00
- Penambahan	Rp.	229.811.724,00
Jumlah	Rp.	274.621.724,00

Pengurangan aset lain-lain:

- Pengurangan	Rp.	21.513.308,00
Jumlah	Rp.	21.513.308,00
Jumlah Aset Lain-lain	Rp.	253.108.416,00

Untuk itu, rekapitulasi barang ke neraca per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

➤ **Aset Tetap Ekstrakomptabel**

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat dalam Neraca namun diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

untuk aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset, yaitu Rp.10.000.000 untuk tanah dan/atau gedung bangunan; serta Rp.250.000 untuk mesin dan peralatan.

Aset Tetap yang nilainya di bawah batasan minimal kapitalisasi aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di dalam Neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptable per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.405.750.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.26.715.000,00 dari saldo awal sebesar Rp. 379.035.359,00.

Uraian	04 Juni 2021	30 Juni 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	320.258.670,00	346.973.670,00	26.715.000,00	7,70
Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Angkutan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.676.000,00	8.676.000,00	0,00	0,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	297.136.500,00	323.851.500,00	26.715.000,00	8,25
Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	3.295.670,00	3.295.670,00	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran dan kesehatan	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00
Alat laboratorium	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00
Alat persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
Rambu-Rambu	0,00	0,00		
Peralatan Olahraga	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	58.776.689,00	58.776.689,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung	58.776.689,00	58.776.689,00	0,00	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/ Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	379.035.359,00	405.750.359,00	26.715.000,00	6,58

Sumber: Buku Inventaris Ekstrakomptabel Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penambahan Barang ekstrakomptabel:

Saldo Per 04 Juni 2021	Rp.	379.035.359,00
- Reklasifikasi	Rp.	10.290.000,00
- Alih Status Penggunaan	Rp.	120.752.000,00
- Hibah	Rp.	4.800.000,00
Jumlah	Rp.	514.877.359,00

Pengurangan Barang Ekstrakomptabel:

- Alih Status Penggunaan	Rp.	109.127.000,00
Jumlah	Rp.	109.127.000,00
Jumlah Barang Ekstrakomptabel	Rp.	405.750.359,00

C.2.2. KEWAJIBAN

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021.

Kewajiban jangka pendek sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.768.072.616,00

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Jumlah Utang Beban	312.697.118,00	768.072.616,00	-455.375.498,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	312.697.118,00	190.261.442,00	122.435.676,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas PNS	0,00	192.451.754,00	-192.451.754,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja PNS	0,00	141.662.190,00	-141.662.190,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja PNS	0,00	217.604.250,00	-217.604.250,00
Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	26.092.980,00	-26.092.980,00
Jumlah Utang Pegawai	312.697.118,00	768.072.616,00	-455.375.498,00

Sumber: Neraca Dinsospmdd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

2. Utang beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.768.072.616,00. Utang Beban sebesar Rp.768.072.616,00 merupakan



utang beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) bulan Desember 2021 yang sudah dibayarkan berdasarkan SPM No. 30.00/03.0/000003/LS/1.06.2.13.0.00.36.0000/14/1/2022 tanggal 18 Januari 2022.

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

C.2.3. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.12.851.748.159,05

Uraian	31 Desember 021	2020	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Ekuitas	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05
Jumlah	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep.Babel Per 31 Desember 2021

C.2.4. JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Nilai kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan nilai aset keseluruhan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah Rp.13.619.820.775,05

Uraian	31 Desember 2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
			Rp.
Kewajiban dan Ekuitas	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05
Jumlah	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep.Babel Per 31 Desember 2021

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada tahun 2021 terdapat kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp.153.032,00 ini dikarenakan ada SPM Nihil yang tidak bisa di SP2Dkan senilai Rp.150.000,00 serta jasa giro bank yang telat otomatis di tarik oleh bank pada tgl 31 Desember sehingga menyisakan saldo di rekening bendahara pengeluaran. Dan kronologis SPM Nihil tidak bisa di SP2Dkan kami sampaikan sebagai berikut :

Sesuai dengan surat edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 900/8030/BAKUDA tanggal 08 November 2021 tentang tertib administrasi dalam menghadapi akhir tahun 2021 maka Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan SPM GU-Nihil ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senilai Rp.382.782.256,00 dan pengembalian sisa GU ke Kasda senilai Rp.316.597.744,00. Pada tanggal 3 Januari 2022 bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapat kabar dari Bakuda yang menginfokan bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2.13.04.1.01) , sub kegiatan Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/ Kota untuk belanja jasa kantor (Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia) senilai Rp.550.000,00 tidak bisa dibuatkan SP2D Nihil dikarenakan anggaran di kode rekening tersebut tidak mencukupi, hanya tersedia Rp.400.000,00 .Dikarenakan belanja tersebut bisa diinput ke BKU SIMDA pada tanggal 17 Desember 2021 dan juga bisa di proses untuk pembuatan SPP serta SPM Nihilnya pada tanggal 31 Desember 2021 maka masalah anggaran tersebut tidak bisa dibuatkan SP2Dnya itu tidak kami pahami kendalanya ada dimana, dan dikarenakan sampai tanggal 4 Desember 2022 hal tersebut belum terselesaikan Bagian Perbendaharaan menyarankan kami untuk berkonsultasi dengan Bagian Akuntansi Bakuda. Setelah ditelusuri oleh Bagian Akuntansi terlihat di kartu kendali kegiatan tersebut ada pergeseran anggaran yang semula pagu anggaran Rp. 6.300.000,00 digeser menjadi Rp.4.000.000,00 setelah itu untuk menelusuri kapan pergeseran itu terjadi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

bagian akuntansi melihat history pergeseran tersebut dan terlihat pergeseran tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2021 yang secara logis hal itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun karena pintu untuk melakukan perubahan itu sudah terkunci dan kenapa bendahara pengeluaran bisa menginput kwitansi pembayaran tersebut karena pada tanggal 17 Desember 2021 anggaran tersebut masih tersedia. Untuk menelusuri kenapa anggaran tersebut bisa berubah pada tanggal 23 Desember 2021 , Bidang Akuntansi menyarankan kami untuk berkoordinasi dengan Bidang Anggaran Bakuda. Dan pada tanggal 5 januari 2022 kami berkoordinasi dengan Bidang Anggaran terkait permasalahan ini, setelah kami menceritakan semua permasalahan yang terjadi Bidang Anggaran menyatakan bahwa, kalau OPD sudah bisa menginput pembayaran di BKU SIMDA sampai terproses pembuatan SPM Nihil itu bukan disebabkan oleh permasalahan di anggaran dan kenapa hal ini bisa terjadi ada kemungkinan kalau SPD kegiatannya yang tidak mencukupi. Dari hasil koordinasi tersebut yang hasilnya tetap harus mengikuti anggaran yang tersedia akhirnya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diambil keputusan untuk mengurangi nilai pembayaran yang semula Rp.550.000,00 menjadi Rp.400.000,00 dan selisih Rp.150.000,00 dikembalikan ke Kasda pada tanggal 06 Januari 2022.

2. Untuk menentukan kewajaran penyajian neraca, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Nilai aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Persamaannya sebagai berikut:

Aset=Kewajiban+Ekuitas		
Aset	:	13.619.820.775,05
Kewajiban	:	768.072.616,00
ekuitas	:	12.851.748.159,05
Jumlah	:	13.619.820.775,05
Selisih	:	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu periode pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional.

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan atas Laporan Operasional (LO) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d. 31 Desember 2021		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN -LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
PAD-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
- Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00		0,00	0,00
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
- Pendapatan Hibah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
BEBAN	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
Beban Pegawai	9.859.999.296,00	0,00	9.859.999.296,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00
Beban Hibah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	0,00
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	264.310.311,83	0,00	264.310.311,83	0,00
Beban Penyusutan gedung dan bangunan	171.831.304,66	0,00	171.831.304,66	0,00
Beban Penyusutan jalan jaringan dan irigasi	28.466.445,18	0,00	28.466.445,18	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	-18.646.034.616,62	-	-18.646.034.616,62	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Peny.Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Keg. Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Peny. Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Keg Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov. Kep. Bangka Belitung s.d.31 Desember 2021



Saldo Operasional per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.18.646.034.616,62) mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.0,00.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayarkan kembali pada periode tahun 2021.

Pada tahun 2021 Pendapatan-LO Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direalisasikan sebesar Rp.1.260.000,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp.0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.1.260.000,00. Nilai sebesar Rp.1.260.000,00 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Retribusi Daerah) yaitu dari Restribusi Daerah Jasa Usaha (Kantin).

Perbandingan realisasi Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN -LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
Pendapatan asli Daerah-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
- Pendapatan Pajak Restribusi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
- Pendapatan Hibah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
Pendapatan-LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021

D.2.2. BEBAN-LO

Beban-LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini



baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan beban lain-lain.

Realisasi Beban-LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.18.926.076.366,62 jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2020 sebesar Rp.0,00. Beban dalam Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 40
Realisasi Beban Operasional
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Sampai Dengan 31 Desember 2021		Kenaikan/ (Penurunan)	%
	2021	2020		
BEBAN OPERASIONAL	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
Beban Pegawai	9.859.999.296,00	0,00	9.859.999.296,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00
Beban Hibah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	264.310.311,83	0,00	264.310.311,83	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.831.304,66	0,00	171.831.304,66	0,00
Beban Penyusutan Jalan, jaringan dan Irigasi	28.466.445,18	0,00	28.466.445,18	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

A. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai yang terjadi pada saat



timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021.

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.859.999.,00 terdiri dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.552.866.499,00 ditambah Belanja Tambahan Penghasilan PNS/CPNS sebesar Rp.5.171.907.797,00 Serta Belanja Honorarium Rp.135.225.000,00

Tabel 41

Rincian Realisasi Beban Pegawai

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi			
	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	4.552.866.499,00	0,00	4.552.866.499,00	0,00
Beban Gaji Pokok	3.164.591.040,00	0,00	3.164.591.040,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga	324.253.770,00	0,00	324.253.770,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan Struktural	194.065.000,00	0,00	194.065.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional	217.026.000,00	0,00	217.026.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum	74.315.000,00	0,00	74.315.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras	204.514.080,00	0,00	204.514.080,00	0,00
Beban Tunjangan PPH/ Khusus	18.817.982,00	0,00	18.817.982,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji	49.658,00	0,00	49.658,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan BPJS	329.420.924,00	0,00	329.420.924,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.453.217,00	0,00	6.453.217,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian	19.359.828,00	0,00	19.359.828,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS/ CPNS	5.171.907.797,00	0,00	5.171.907.797,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja ASN	1.135.224.018,00	0,00	1.135.224.018,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.407.332.417,00	0,00	1.407.332.417,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja ASN	1.051.218.469,00	0,00	1.051.218.469,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.578.132.893,00	0,00	1.578.132.893,00	0,00
Honorarium	135.225.000,00	0,00	135.225.000,00	0,00
Beban Honorarium	135.225.000,00	0,00	135.225.000,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai	9.859.999.296,00	0,00	9.859.999.296,00	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021



Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021.

B. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Terdiri dari Beban Persediaan , Beban Jasa, Beban pemeliharaan, dan Beban perjalanan dinas. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat.

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Beban Barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.995.526.408,95 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Realisasi Beban Persediaan
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi			
	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00
Beban Bahan pakai Habis	1.557.510.079,95	0,00	1.557.510.079,95	0,00
Beban Jasa kantor	2.783.710.418,00	0,00	2.783.710.418,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	195.921.800,00	0,00	195.921.800,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin	181.275.875,00	0,00	181.275.875,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238.123.792,00	0,00	238.123.792,00	0,00
Beban Pemeliharaan jalan,Jaringan dan Irigasi	19.601.485,00	0,00	19.601.485,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.286.922.959,00	0,00	1.286.922.959,00	0,00
Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain /masyarakat	408.460.000,00	0,00	408.460.000,00	0,00
Jumlah Beban Barang	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020



C. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 dan Rp.0,00 .

Beban Hibah merupakan beban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tau pemerintah daerah lain, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, badan , lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Realisasi Beban Hibah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Realisasi Beban Jasa	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

D. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.405.942.600,00 dan Rp.0,00 . Beban Bantuan Sosial merupakan beban yang dimaksudkan untuk pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



Rincian beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Realisasi Beban Bantuan sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi			
	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	0,00
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	260.184.000,00	0,00	260.184.000,00	0,00
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga	950.577.600,00	0,00	950.577.600,00	0,00
Beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	195.181.000,00	0,00	195.181.000,00	0,00
Realisasi Beban Pemeliharaan	1.405.942.600,00	0,00	1.405.942.600,00	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsos Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

E. Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.464.608.061,67 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 44

Rincian Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	264.310.311,83	0,00	264.310.311,83	0,00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	21.633.415,83	0,00	21.633.415,83	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	69.456.739,83	0,00	69.456.739,83	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	1.143.770,83	0,00	1.143.770,83	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	338.333,33	0,00	338.333,33	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Alat Ukur	147.583,33	0,00	147.583,33	0,00
Beban Alat Pengolahan	8.773.600,00	0,00	8.773.600,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	23.580.828,51	0,00	23.580.828,51	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	28.814.513,33	0,00	28.814.513,33	0,00
Beban Penyusutan Komputer	51.497.499,67	0,00	51.497.499,67	0,00
Beban Peralatan Komputer	48.806.821,33	0,00	48.806.821,33	0,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	(1.505.191,00)	0,00	-1.505.191,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Studio	4.448.333,00	0,00	4.448.333,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	1.942.500,00	0,00	1.942.500,00	0,00
Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	5.149.897,17	0,00	5.149.897,17	0,00
Beban Rambu-rambu lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban peralatan olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat pemancar	81.666,67	0,00	81.666,67	0,00
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	171.831.304,66	0,00	171.831.304,66	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.954.914,33	0,00	141.954.914,33	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	27.418.531,00	0,00	27.418.531,00	0,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan /Prasasti	2.457.859,33	0,00	2.457.859,33	0,00
Beban Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.466.445,18	0,00	28.466.445,18	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	6.241.306,17	0,00	6.241.306,17	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.273.081,83	0,00	1.273.081,83	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/ Baku	904.166,67	0,00	904.166,67	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/ Air Bersih	404.450,67	0,00	404.450,67	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	9.546.149,00	0,00	9.546.149,00	0,00
Beban Penyusutan jaringan air minum	8.929.028,17	0,00	8.929.028,17	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.168.262,67	0,00	1.168.262,67	0,00
Jumlah Realisasi Beban Penyusutan	464.608.061,67	0,00	464.608.061,67	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

➤ SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/ defisit dari operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dalam Kegiatan Operasional tahun anggaran 2021, berdasarkan realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp.280.041.750,00 dan realisasi Beban-LO sebesar Rp.18.926.076.366,62 maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami surplus/defisit dari operasi sebesar (Rp.18.646.034.616,62).

Tabel 45

**Rincian Realisasi Surplus/Defisit dari Operasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
Pendapatan	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
Beban	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi (1-2)	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmdd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam Pendapatan/ Beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

A. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan periode 31 Desember 2021 tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari kegiatan non operasional sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran



2020 sebesar Rp.0,00 sehingga tidak terjadi peningkatan/ penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020.

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Tidak ada realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Tidak ada realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Tidak ada realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Tidak ada realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Tidak ada realisasi Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 sehingga tidak terjadi peningkatan/ penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.0,00 atau 0.00 persen.

B. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan selisih lebih/ kurang antara surplus/ defisit operasi dari kegiatan non operasional. Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.(18.646.034.616,62)

C. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Surplus/ Defisit-LO dari kegiatan pos luar biasa sebesar Rp.0,00 sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari pos luar biasa.

➤ SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/ defisit-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/ kurang antara Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional dengan Pos Luar Biasa. Surplus/ Defisit-LO Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.(18.646.034.616,62)

Tabel 46

Rincian Realisasi Surplus/Defisit -LO

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s.d. Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Surplus/ Defisit - LO	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
Surplus/ Defisit - LO	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00
Jumlah Surplus/ Defisit - LO (1-2)	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Restribusi Daerah yang berasal dari Jasa Usaha Kantin ter realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.260.000,00. Sehingga realisasi Pendapatan s.d Desember 2021 yang sudah disetorkan oleh



Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah masuk kedalam Laporan Bendahara Penerimaan PPKD.

2.Bahwa Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO). Persamaannya sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO)

Surplus (Defisit) LO	:	-18.646.034.616,62
Total Pendapatan (LO)	:	280.041.750,00
Total Beban (LO)	:	18.926.076.366,62
Tatol Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	:	0,00
Total Pos Luar Biasa	:	0,00
Jumlah	:	-18.646.034.616,62
Selisih	:	0,00

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/ defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31Desember 2021 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama tahun anggaran 2021.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31Desember 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 47

Laporan Perubahan Ekuitas
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s.d. Periode yang Berakhir 31Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi			
	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
EKUITAS AWAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	13.231.575.047,67	0,00	13.231.575.047,67	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	-94.730.927,02	0,00	-94.730.927,02	0,00
Selisih Revaluasi aset tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	13.326.305.974,69	0,00	13.326.305.974,69	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.266.207.728,00	0,00	18.266.207.728,00	0,00
EKUITAS AKHIR	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05	0,00

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas Dinsospmd Prov.Kep.Babel Per 31 Desember 2021 dan 2020

A. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Dinas Sosial Provisi Kepulauan Bangka Belitung pada Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang berasal dari jumlah semua aset dikurangi kewajiban jangka pendek. Ekuitas akhir muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja.

B. SURPLUS-DEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp.(18.646.034.616,62) berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban dan Belanja yang menjadi tanggungan tahun anggaran 2021 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional berupa:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	280.041.750,00
2	Beban	18.926.076.366,62
	Beban Pegawai	9.859.999.296,00
	Beban barang dan jasa	6.695.526.408,95
	Beban Hibah	500.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial	1.405.942.600,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	264.310.311,83
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.831.304,66
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.466.445,18
	Jumlah	-18.646.034.616,62

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar merupakan Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.13.231.575.047,67 yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.13.236.974,69 dan Koreksi Nilai persediaan Rp. (94.730.927,02).

D. RK-PPKD (Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan)

Nilai RK PPKD per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.266.207.728,00 merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan RK PPKD

E. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir atau ekuitas dihitung atas dasar ekuitas awal dan koreksi ekuitas lainnya dengan surplus atau defisit-LO dan kewajiban yang dikonsolidasikan.

Saldo Ekuitas Akhir Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 sebesar Rp.12.851.748.159,05 merupakan Surplus/ Defisit-LO dikurangi Ekuitas Awal dan Koreksi-koreksi Lainnya.

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	0,00
2	Surplus/ Defisit-LO	-18.646.034.616,62
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	13.231.575.047,67
	<i>Koreksi Nilai persediaan</i>	-94.730.927,02
	<i>Koreksi Ekuitas Lainnya</i>	13.326.305.974,69
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	18.266.207.728,00
5	Ekuitas Akhir	12.851.748.159,05

Saldo Ekuitas Akhir ini merupakan Ekuitas Akhir Neraca dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021.

E.2. CATATAN PENTING LAINNYA

Terdapat catatan penting lainnya dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), untuk menentukan kewajaran penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan ekuitas akhir pada neraca periode sebelumnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Persamaannya sebagai berikut:

$\text{Ekuitas awal (LPE)} = \text{Ekuitas akhir neraca periode sebelumnya}$
--

Dengan persamaan tersebut maka LPE dan Neraca Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah:

Saldo ekuitas awal (LPE)	:	0,00
Saldo ekuitas akhir neraca periode sebelumnya	:	0,00
Selisih	:	0,00

- Bahwa surplus/ defisit pada LO sama dengan surplus/defisit pada LPE. Persamaannya sebagai berikut:

$\text{Surplus/ defisit pada LO} = \text{Surplus/ defisit pada LPE}$
--

Dengan persamaan tersebut maka LO dan LPE Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 adalah:

Saldo surplus/ defisit pada LO	:	-18.646.034.616,62
Saldo surplus/ defisit pada LPE	:	-18.646.034.616,62
Selisih	:	0,00

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s.d. 31 Desember 2021 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan s.d. 31 Desember 2021 disajikan sesuai dengan kondisi yang obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saldo kas Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.153.032,00.
- Persediaan barang yang masih ada di Pengurus Barang telah dikalkulasi secara cermat dan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terpakai yang sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki saldo sebesar Rp.107.414.921,05.
- Secara ringkas, Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2021					2020
		2021				Realisasi	
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa		
1	Pendapatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Restribusi Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Belanja	22.760.090.120,95	18.267.317.728,00	0,00	3.927.802.632,95	0,00	
2.1	Belanja Operasi	22.464.406.020,95	18.113.507.728,00	0,00	3.785.928.532,95	0,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	11.789.963.477,95	9.404.623.798,00	0,00	2.385.339.679,95	0,00	
2.1.2	Belanja Barang	8.203.530.183,00	6.802.941.330,00	0,00	1.400.588.853,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.970.912.360,00	1.405.942.600,00	0,00	564.969.760,00	0,00	
2.2	Belanja Modal	295.684.100,00	153.810.000,00	0,00	141.874.100,00	0,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	275.684.100,00	153.810.000,00	0,00	121.874.100,00	0,00	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00	0,00	
Surplus/ (Defisit)		-22.758.830.120,95	-18.266.057.728,00	0,00	-3.927.802.632,95	0,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		-22.758.830.120,95	-18.266.057.728,00	0,00	-3.927.802.632,95	0,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021



d. Secara ringkas, Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	%
	2021	2020		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN -LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
Pendapatan asli Daerah-LO	1.260.000,00	0,00	1260.000,00	0,00
- Pendapatan Restribusi Daerah-LO	1260.000,00	0,00	1260.000,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang sah-LO	278.781.750,00	0,00	278.781.750,00	0,00
- Pendapatan Hibah-LO	278.781.750,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan-LO	280.041.750,00	0,00	280.041.750,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
Beban Pegawai	9.859.999.296,00	0,00	9.859.999.296,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	6.695.526.408,95	0,00	6.695.526.408,95	0,00
Beban Hibah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	1405.942.600,00	0,00	1405.942.600,00	0,00
Beban Penyusutan peralatan dan Mesin	264.310.311,83	0,00	264.310.311,83	0,00
Beban Penyusutan Grdung dan Bangunan	171831304,66	0,00	171831304,66	0,00
Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi	28.466.445,18	0,00	28.466.445,18	0,00
Beban	18.926.076.366,62	0,00	18.926.076.366,62	0,00
Surplus / Defisit LO	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00

Sumber: Laporan Operasional Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

e. Secara ringkas, Neraca sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	107.567.953,05	0,00	107.567.953,05	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	153.032,00	0,00	153.032,00	0,00
Persediaan	107.414.921,05	0,00	107.414.921,05	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	13.259.144.406,00	0,00	13.259.144.406,00	0,00
Tanah	407.800.656,00	0,00	407.800.656,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.135.307.229,00	0,00	7.135.307.229,00	0,00
Gedung dan Bangunan	14.520.919.616,00	0,00	14.520.919.616,00	0,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	396.032.673,00	0,00	396.032.673,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	263.834.000,00	0,00	263.834.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-9.464.749.768,00	0,00	-9.464.749.768,00	0,00
Aset Lainnya	253.108.416,00	0,00	253.108.416,00	0,00
Aset Lain-lain	253.108.416,00	0,00	253.108.416,00	0,00
JUMLAH ASET	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05	0,00
KEWAJIBAN				0,00
Kewajiban Jangka Pendek	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00	0,00
Utang Beban	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	768.072.616,00	0,00	768.072.616,00	0,00
EKUITAS				0,00
Ekuitas	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05	0,00
JUMLAH EKUITAS	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	13.619.820.775,05	0,00	13.619.820.775,05	0,00

Sumber: Neraca Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tutup Buku per Tanggal 31 Desember 2021

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- f. Secara ringkas, Laporan Perubahan Ekuitas disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi			
	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
EKUITAS AWAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT -LO	-18.646.034.616,62	0,00	-18.646.034.616,62	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	13.231.575.047,67	0,00	13.231.575.047,67	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	-94.730.927,02	0,00	-94.730.927,02	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	13.326.305.974,69	0,00	13.326.305.974,69	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.266.207.728,00	0,00	18.266.207.728,00	0,00
EKUITAS AKHIR	12.851.748.159,05	0,00	12.851.748.159,05	0,00

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas Dinsospmd Prov. Kep. Babel Per 31 Desember 2021

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan yang telah dipercayakan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS

BUDI UTAMA, S.STP., M.si

NIP. 198305152001121004